

6



**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2020**



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemetaan adalah hasil penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2021 disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2021, diselaraskan dengan rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Renja PD Provinsi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

BAB II SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PD

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V Penutup

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Renja PD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan alat evaluasi kinerja PD Tahun 2021.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PD

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemetaan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menjamin konsistensi dokumen perencanaan.
- (3) Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Dan sebagai penjabaran RPJMD dalam setiap Tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang merupakan landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dalam program dan kegiatan yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun kelima yaitu Tahun 2015-2021 yang memuat rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya. Renja tersebut juga telah memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam rangka mensinergikan dan mensinkronkan pembangunan daerah.

Proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dilakukan sebelum proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Forum Perangkat Daerah dengan harapan program dan kegiatan yang direncanakan terdapat adanya sinkronisasi mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah. Dalam Rencana Kerja pada Tahun 2021 telah diupayakan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan diupayakan memperhatikan program/kegiatan dari atas (*top down*) serta menampung usulan dari bawah (*Bottom Up*), dengan proses sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan awal Renja untuk diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul selanjutnya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan akhir Renja melalui Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
3. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan untuk diacu Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut sebagai akibat adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan, terdapat hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu:

1.1.1. Renja PD dengan RKPD

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen operasional tahunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas daerah menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan prioritas Perangkat Daerah;

1.1.2. Renja PD dengan Renstra PD

Renstra PD menjadi acuan Renja PD dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD;

1.1.3. Renja PD dengan Renja Kementerian/Lembaga dan PD Daerah Istimewa Yogyakarta memperhatikan program/kegiatan Renja K/L dan Renja Daerah Istimewa Yogyakarta

Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja Kementerian/Lembaga dan PD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja PD. Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD, untuk selanjutnya sebagai bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam mencapai Rencana Strategis yang telah disepakati dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pedoman penyusunan Renja ini sudah diupayakan untuk lebih mendekatkan pada mekanisme aturan yang ada, sehingga akibat dari pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat dipertanggungjawabkan, serta bermanfaat bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11).
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2391 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

4. mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
5. sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring, dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan Sipil.

1.4. Sistematika Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Uraian garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019

Setiap kegiatan/program merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021, yang merupakan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD demikian juga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul juga merupakan pelaksanaan tahun ke lima Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021. Sejauhmana pelaksanaan Renja Tahun 2019 dapat kami sampaikan hasil evaluasi analisis setiap kegiatan sebagaimana berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Pada kegiatan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.199.480.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.119.263.482,00 atau 93,31% dari target Renstra sebesar Rp2.887.741.065,00, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 98%, hal ini disebabkan upah THL kurang tepat kalua dijadikan indikator kegiatan secara volume 10 orang THL terpenuhi, namun 2 orang THL mengambil cuti bersalin sehingga OBnya tidak terpenuhi sehingga terdapat efisiensi. Tambahan belanja modal pada perubahan APBD semuanya dapat dilaksanakan seperti pengadaan server beserta lisensinya, 2 set sound sistem, 10 printer dan 4 AC, 3 tablet, 1 kursi roda, dan 1 komputer pada kegiatan ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp80.216.518,00 yang harus disetor ke kas daerah ;

b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan, maka diperlukan adanya koordinasi baik ke Daerah Istimewa Yogyakarta maupun ke pusat. Guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan anggaran untuk kegiatan tersebut yang mana pada kegiatan ini sebagaimana ditargetkan dalam Renstra sebesar Rp620.466.000,00 dan untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp125.375.000,00 yang dapat direalisir sebesar Rp117.248.592,00 atau 93,52%, dengan capaian fisik sebesar 100%, namun secara keuangan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.125.408,00 yang harus disetor ke kas

daerah hal ini disebabkan secara fisik terealisir, namun ada kesalahan administrasi sumber dana yang seharusnya sumber dana DAK masuk DAU.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
 - a. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran Anggaran yang ditargetkan dalam Renstra sebesar Rp2.131.160.500,00 untuk Tahun 2019 belanja modal anggarannya dipindah ke kegiatan 1.01;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran Pada kegiatan ini dalam Renstra ditargetkan sebesar Rp971.812.900,00 yang mana untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp142.897.800,00 dengan realisasi sebesar Rp138.569.561,00 atau 96,97%, dengan realisasi fisik sebesar 100%, karena pemeliharaan 27 kendaraan roda 2 dan 5 kendaraan roda 4, pemeliharaan Gedung dan sekat ruang dapat dilaksanakan semua sehingga telah memenuhi target Renstra.
3. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur :
 - a. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
Dari anggaran yang ditargetkan dalam Renstra sebesar Rp21.491.000,00 pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp3.319.000,00 dapat terealisir sebesar Rp3.319.000,00 atau 100% dikarenakan rapat koordinasi pembinaan aparatur dengan target sebanyak 78 aparatur telah dapat dilaksanakan, sehingga telah memenuhi target Renstra.
 - b. Pengembangan kapasitas aparatur
Dari anggaran yang ditargetkan dalam Renstra sebesar Rp166.172.500,00 pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp12.500.000,00 dapat terealisir sebesar Rp12.500.000,00 atau 100% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 111,43% karena dari target pelatihan 70 personil dalam pelaksanaannya terdapat 78 personil hal ini karena juga mengikutsertakan personil THL yang ada, sehingga telah melebihi target Renstra.
4. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah:
Kegiatan ini ditargetkan sebesar Rp660.452.600,00 dalam Renstra, Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp7.969.000,00 yang dapat terealisir sebesar Rp7.968.500,00 atau dengan capaian keuangan sebesar 99,99%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp500,00 yang harus disetor ke kas daerah;

5. Program peningkatan kualitas perencanaan :
- a. Perencanaan kinerja perangkat daerah
Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung laporan penyusunan LKjIP, Renja PD beserta perubahannya dan Rencana Kerja dan Anggaran PD dari target anggaran Renstra yang ditetapkan sebesar Rp106.175.600,00 yang mana untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp11.045.000,00 yang mana dapat terealisir sebesar Rp11.045.000,00 atau dengan capaian kinerja keuangan 100%, dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% hal sehingga telah memenuhi target Renstra;
 - b. Pengendalian internal perangkat daerah
Kegiatan ini diperlukan untuk monitoring program/kegiatan yang ada di PD apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak, apakah ada permasalahan atau tidak, bila ada permasalahan untuk segera dapat dicari solusinya dan dari target Renstra sebesar Rp24.712.300,00 yang mana untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp3.379.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.379.000,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.
6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik :
- Penyelenggaraan pelayanan publik
- Kegiatan ini muncul sebagai upaya monitoring pelayanan dinas Dukcapil terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan atau tidak dengan mengadakan survei pelanggan yang dilaksanakan setiap semesternya dan untuk fasilitasi penyelenggaraan pelayanan khususnya yang ada di dinas. Dari target Renstra sebesar Rp82.361.175,00 pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp138.637.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp134.293.250,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%, dengan capaian fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp4.343.750,00 diantaranya dari sisa cetak yang harus disetor ke kas daerah.
7. Program pengelolaan administrasi kependudukan:
- a. Pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas penduduk
Pada kegiatan ini dalam Renstra dianggarankan sebesar Rp8.199.547.950.000,00 untuk belanja ATK kegiatan, cetak blangko KK, KIA, penggandaan, dan belanja makanan dan minuman rapat. Kegiatan ini untuk mendukung terlanyarnya dokumen kependudukan per keluarga berupa Kartu Keluarga, KTP dan KIA. Tahun Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.816.535.500,00,dapat direalisasikan sebesar

Rp1.754.810.918,00 atau dengan kinerja keuangan sebesar 96,60% dengan capaian fisik sebesar 100%, hal ini disebabkan anggaran cetak blangko KK, KIA dan pengadaan ATK berupa Ribbon dan HDD Film untuk KTP dan KIA terdapat sisa sebesar Rp61.724582,00 yang harus dikembalikan ke kas daerah, sehingga target telah terpenuhi;

- b. Pelayanan pindah datang dan pendataan kependudukan
Kegiatan ini diperuntukkan memfasilitasi pelayanan mobilitas penduduk baik penduduk yang datang maupun yang pergi baik untuk honor tim pelaksanaan kegiatan, rapat koordinasi maupun pengadaan ATK, serta pengadaan formulir-formulir isian yang telah ditentukan dari Kementerian Dalam Negeri serta perjalanan dinas rekam data KTP-el manula dan disabilitas dengan target Renstra sebesar Rp1.801.113.050,00 yang mana Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp138.945.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp135.894.000,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,80%, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Terdapat sisa belanja diantaranya dari pencetakan formulir-formulir kependudukan yang seluruhnya sebesar Rp3.051.000,00 yang harus disetor ke kas daerah dan telah memenuhi target Rensta.

8. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian

Kegiatan ini untuk mengakomodir pelayanan akta-akta pencatatan sipil baik yang dilaksanakan di dinas maupun pelayanan keliling/jemput bola dan koordinasi baik dengan Pemerintah Desa serta istansi terkait di bidang pencatatan sipil, penyuluhan-penyuluhan akta-akta catatan sipil sebelum dilaksanakan pelayanan di tempat/keliling hal ini dimaksudkan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dengan anggaran yang ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp2.036.162.025,00 pada Tahun 2019 ini dianggarkan sebesar Rp239.929.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp219.017.700,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,28%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan, sisa anggaran sebesar Rp20.911.800,00 yang harus disetor ke kas daerah diantaranya sisa cetak dan makan minum rapat koordinasi pelayanan;

- b. Pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian

Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas petugas pencatat perkawinan non muslim dengan pemberian insentif/

honorarium bagi petugas P4 sebagai mitra kerja petugas pencatatan sipil baik yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Besarnya anggaran yang ditargetkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp1.383.150.725,00 yang mana untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp51.645.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp50.829.000,00 atau dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,42% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 98% sehingga belum memenuhi target Renstra karena target pencatatan perkawinan yang ditargetkan sebanyak 200 pasang hanya terrealisasi sebanyak 165 pasang dan sisa anggaran sebesar Rp816.000,00 harus disetor ke kas daerah.

9. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi

a. Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi terkait kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, baik melalui tatap muka, spot radio, media on line, dan digitalisasi arsip guna memudahkan menemukan kembali bila saatnya diperlukan. Besarnya anggaran yang ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp1.320.415.825,00 yang Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp220.717.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp218.379.500,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,94%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100% sehingga telah memenuhi target Renstra, sisa anggaran sebesar Rp2.337.500,00 harus disetor ke kas daerah;

b. Pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data
Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya dan lancarnya pelayanan kepada masyarakat dan terpeliharanya jaringan SIAK untuk kelancaran pelayanan dokumen adminduk. Besarnya dana untuk kegiatan ini ditargetkan sebesar Rp1.120.859.075,00 yang mana untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp43.746.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp43.556.100,00 atau dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,57%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%, sehingga telah memenuhi target Renstra, sisa anggaran sebesar Rp189.900,00 harus disetor kembali ke kas daerah.

10. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi

a. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir kepada lembaga/OPD dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan baik dalam rangka untuk kepentingan pembangunan maupun sektor lain, anggaran yang ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp854.190.150,00, yang mana Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp63.114.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp63.044,00 atau dengan kinerja keuangan sebesar 99,89% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100% sehingga telah melebihi target Renstra, hal ini disebabkan jumlah pemanfaatan pelayanan data yang ditargetkan sebanyak 30 lembaga sudah terrealisir sebanyak 63 lembaga/desa;

b. Kerja sama dan inovasi pelayanan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kerja sama dinas dan lembaga lain dalam rangka pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama dan mendorong terlaksananya inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Besarnya dana untuk kegiatan ini ditargetkan sebesar Rp684.924.025,00 yang mana untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp97.585.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp93.067.000,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,37% dengan realisasi fisik sebesar 100 sehingga telah memenuhi target Renstra, sisa anggaran sebesar Rp4.518.000,00 harus disetor Kembali ke kas daerah.

Dari penjelasan tersebut di atas secara ringkas dapat dilaporkan target Renstra sebesar Rp4.316.818.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.126.184.603,00 (95,58%), sehingga realisasi secara keuangan dapat dikatakan sangat berhasil, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 99,29%. Untuk lebih jelasnya dapat kami jelaskan hasil analisis di atas sebagaimana berikut :

1. Program/kegiatan yang belum dapat memenuhi target kinerja terdapat pada kegiatan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian, dengan serapan anggaran keuangan sebesar 98,42% dengan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 98%;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terdapat pada :
 - a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran, dengan serapan anggaran 93,31% dengan kinerja capaian fisik kegiatan sebesar 100%;

- b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi dengan realisasi serapan anggaran sebesar 93,52% dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran, dengan realisasi anggaran sebesar 96,97%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi keuangan sebesar 100% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- e. Pengembangan kapasitas aparatur, dengan serapan anggaran sebesar 100%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- f. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah, dengan realisasi serapan anggaran sebesar 99,99%, dengan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 91,67%;
- g. Perencanaan kinerja perangkat daerah dengan realisasi anggaran sebesar 100%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- h. Pengendalian internal perangkat daerah dengan realisasi serapan anggaran sebesar 100% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- i. Penyelenggaraan pelayanan publik, dengan realisasi anggaran sebesar 96,87% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- j. Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk, dengan realisasi anggaran keuangan sebesar 96,80%, dengan tingkat capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- k. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan, dengan realisasi anggaran sebesar 97,80%, dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- l. Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian, dengan realisasi serapan anggaran keuangan sebesar 91,28% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- m. Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi capaian keuangan sebesar 98,94% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- n. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data dengan realisasi capaian keuangan sebesar 99,57% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%;
- o. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dengan realisasi anggaran keuangan sebesar 99,89% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%;
- p. Kerja sama dan inovasi pelayanan, dengan serapan anggaran sebesar 93,37% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Sedangkan program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan pada Tahun 2019 tidak ada;
4. Faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya target kinerja antara lain:
 - a. Kondisi ekonomi calon pasangan perkawinan;
 - b. Dimungkinkan perkawinan telah dilangsungkan, namun belum dilaporkan/tidak mengundang petugas pencatat perkawinan;
 - c. calon pasangan perkawinan yang ditargetkan sebanyak 200 pasangan tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang berhasil melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya sebanyak 165 pasangan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja dinas pada Tahun 2020 :
 - a. Kondisi bencana Covid 19 yang melanda hampir seluruh wilayah RI mempengaruhi menurunnya permohonan dokumen kependudukan;
 - b. Ketergantungan blangko KTP dari Pusat
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasai hal tersebut antara lain :
 - a. Melaksanakan pelayanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara daring yaitu pemohonan mengajukan pelayanan dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan melalui media sosial WA dengan menghubungi nomor yang telah ditentukan, kemudian pada saatnya pemohon mengambil dokumen yang sudah jadi sambil menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. bagi pemohon yang datang ke dinas dengan :
 - ✓ pengaturan jarak tempat duduk pemohon;
 - ✓ penyediaan bahan cuci tangan pemohon;
 - ✓ dan mengukur suhu badan setiap pemohon
 - c. Mohon ketersediaan blangko KTP pusat untuk dapat ditingkatkan ;
 - d. Penggeseran dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 dengan penyediaan bahan kebersihan dan APD serta penyesuaian target kinerja saat perubahan APBD.

Untuk selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 terhadap pencapaian Renstra 2016-2021 dapat dilihat tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Nomor Kode Urusan/Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keharuan Kegiatan PD tahun 2019			Target program/kegiatan PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		
				Target	Realisas i	Tingkat Realissi (%)		Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7=6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Siemut Urusan Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	98	98	100	89	89,00
6	1	1	Penyediaan Jasa, Perlitan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	100	98	98	100	97	97,00
			Jumlah Surat yang dikirim	3.925	1.200	1.251	104	1.025	1.025	26,11
			Jumlah rekening air yang dibayar	57	12	12	100	12	12	21,05
			Jumlah rekening listrik yang dibayar	57	4	4	100	12	12	21,05
			Jumlah rekening telepon yang dibayar	60	12	12	100	12	12	20,00
			Jumlah kendaraan dinas yang terbanyak penukanya	29	27	27	100	32	32	110,34

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dinas dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/kogn itas Renstra PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100
		Jumlah note book book yang dipeleihara	0	0	0	0	10	2	0,00
		Jumlah komputer yang dipeleihara	0	0	0	0	46	0	0,00
		Jumlah mesin ketik yang dipeleihara	0	0	0	0	1	1	0,00
		Jumlah printer yang dipelihara	0	0	0	0	63	50	0,00
		Jumlah UPS yang dipelihara	0	0	0	0	3	0	0,00
		Jumlah LCD yang dipelihara	0	0	0	0	2	0	0,00
		Jumlah AC yang dipelihara	0	0	0	0	47	30	0,00
		Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	7	1	99,04	9,904	0	0,00	0,00
		Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	31	4	4	100	29	1	3,23
		Jumlah macam barang cetakan yang dicetak dan digandakan	13	4	4	100	8	25,00	192,31
		Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	12	4	4	100	8	25,00	208,33

Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indicator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keturuan Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg- iatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkirasan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Renja Kinerja (%)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Jumlah macam bahan kebersihan yang dibeli	19	4	4	4	100	4	50,00	263,16	
	Jumlah eksemplar surrat kabar yang dibayar/dibeli	3.600								
	Jumlah orang tenaga harian lepas yang dibayar	14	10	9	90	0	0	0	0,00	
	Jumlah almarai yang dibeli	0	0	0	0	0	10	10	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah alat rekam KTP yang dibeli	0	0	0	0	0	8	8	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah UPS yang dibeli	0	0	0	0	0	1	1	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah meja satu biro yang dibeli	0	0	0	0	0	2	2	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah meja setengah biro yang dibeli	0	0	0	0	0	6	6	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah meja rapat yang dibeli	0	0	0	0	0	22	22	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah rak arsip yang dibeli	0	0	0	0	0	4	4	0,00	Target Renstra pada 2.01
	Jumlah peralatan JARKOMDAT yang dibeli	0	0	0	0	1	1	1	0,00	Target Renstra pada 2.01

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/kegiatan Renstra PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		
				Target	Realisasi	Trigat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	
		Jumlah soud yang dibeli	0	2	2	100	0	0	0,00	
		Jumlah Tablet yang dibeli	0	3	3	100	0	0	2,01	
		Jumlah AC yang dibeli	0	4	4	100	0	0	2,01	
		Jumlah server yang dibeli	0	1	1	100	0	0	2,01	
		Jumlah kursi roda yang dibeli	0	1	1	100	0	0	2,01	
6	1	2	Penyelidikan rapet-rapet, konsultasi dan koordinasi	100	39	100	100	100	80,00	
		Jumlah peserta rapat yang disediakan snek dan minum	3.800	700	700	100	700	320	8,42	
		Jumlah peserta rapat yang disediakan makan dan minum	3.150	700	700	100	700	310	9,84	
		Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	1.086	125	125	100	125	50	4,60	
		Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah propinsi	218	52	52	100	52	37	16,97	

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan/Eldang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keleburan Kegiatan PD tahun 2019			Target program/kieg laihan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program /kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7-(6/5)*100	8	9	10-(9/4)*100
									11
6 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah perubahan peria administik yang disusun	0	1	1	100	1	1	0,00
6 1 2 1	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100	100	100	100	100	100	100,00
		Jumlah meja biro sedang yang dibeli	2	0	0	0	0	0	0,00
		-Jumlah meja rapat yang dibeli	23	0	0	0	0	0	0,00
		-Jumlah AC yang dibeli	8	0	0	0	0	0	0,00
		-Jumlah rak surrat kabar yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah papuan pengurnuran yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0,00

Nomor Kode Urusan dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target: capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target/ pihan Renstra PD berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan			
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11		
		Jumlah kursi rapat yang dibeli	150	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah meja kursi tamu yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah kursi tunggu yang dibeli	11	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah kursi kerja yang dibeli	8	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah rak arsip yang dibeli	33	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah mesin penghancur kertas yang dibeli	2	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah almari besi yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah Filing kabinet yang dibeli	7	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah PABX yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah Router Mikrotik yang dibeli	6	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah Rak Server yang dibeli	2	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah UPS yang dibeli	20	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Jumlah Rak Stavolt yang dibeli	2	2	2	0	0	0	0	0,00		

Nomor Kode Urusan dan Kegiatan	Urusan/Eldang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg iatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		
				Target	Realisas i	Tingkat Realisas (%)		Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									Catatan	
1	2	3	4	5	6	7-(6/5)*100	8	9	10-(9/4)*100	
		Jumlah IP CAM yang dibeli	16	16	16	0	0	0	0,00	
		Jumlah Brankas yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Kamera yang dibeli	3	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Komputer yang dibeli	18	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Printer yang dibeli	23	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Scanner yang dibeli	2	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Lap Top yang dibeli	7	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Alat Rekam KTP el yang dibeli	20	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Meja Pelayanan yang dibeli	5	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah Backdrop yang dibeli	2	0	0	0	0	0	0,00	
		Jumlah lahan parkir yang dihangus	1	0	0	0	0	0	0,00	
6	1	2	2	100	100	100	100	100	100,00	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran							Telah memenuhi target	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	25	27	27	100	27	8	31,52	

Nomor Kode Urusan,Program dian Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kepatatan PD tahun 2019			Target program/Iceg tatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Realisasi Renstra Kinerja Renja (Tahun 2020)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Perkirasai realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realiss ai	Tingkat Realisasi (%)					
1	1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
			Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	4	5	5	100	5	5	125,00	
			Jumlah AC yang dipelihara	54	54	31	57	0	0	0,00	
			Jumlah Gordyn yang dibeli	25	25	25	100	0	0	0,00	
			Jumlah Tralis yang dibeli	25	46	46	100	0	0	0,00	
			Jumlah Film Kaca Jrrneda yang dibeli	100	2	2	100	0	0	0,00	
			Jumlah gedung yang dipelihara yang dibangun	1	1	1	100	1	1	100,00	
			Jumlah Sekat Ruang yang dibangun	2	1	1	100	0	0	0,00	
6	1	3	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	100	100	100	100	100	67	66,67	
6	1	3	Penyelegaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat daerah Aparatur	100	78	78	100	74	0	0,00	Telah memenuhi target
6	1	3	Pengembangan Kapasitas ASN	100	78	78	100	100	67	66,67	Telah memenuhi target
			Persentase ASN yang terfasilitasi yang diberikan mengikuti diktat jaringan dan sertifikasi mikrotil	0	0	0	0	2	2	0,00	

Kode Urusan-Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keltuaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg iatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7-(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100 11
		Jumlah ASN yang dilirim mengikuti diklat DBMS dan Oracle		0	0	0	1	0	0,00
		Jumlah ASN yang dilirim mengikuti diklat exelon service		0	0	0	65	65	0,00
6	1 4	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun terpat waktu	100	100	100	100	100	100,00
6	1 4 1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100	14	14	100	100	100,00
		Jumlah laporan keuangan bukansan/SPJ	144	12	12	100	12	12	8,33
		Jumlah laporan keuangan Semesteran	10	1	1	100	1	1	10,00
		Jumlah dokumen laporan Tahunan CALK	5	1	1	100	1	1	20,00
		Jumlah metrai yang diberi	3.025	636	636	100	0	0	0,00

Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan	Urusan/Esdeng Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Kehuaran Kepiatan PD tahun 2019			Target program/keg iatan Renja PD tahun berjalan. (Tahun 2020)	Perkiraa realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		
			Target capaihan kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Renja Tingkat Capaian Kinerja (%)		
							Realisasi Kinerja Renja Tingkat Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	
6	1	Jumlah personil yang menangani laporan keuangan/denda administratif	165	0	0	7=(6/5)*100	0	0	
6	1	Program Peninggatan Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
6	1	Jumlah dokumenLKjIP yang disusun	100	100	100	100	100	100,00	
		Jumlah dokumen Renstra dan perubahannya yang disusun	5	1	1	100	1	20,00	
		Jumlah dokumen Renstra dan perubahannya yang disusun	2	0	0	0	1	50,00	
		Jumlah dokumen RKA dan perubahann RKA yang disusun	10	2	2	100	2	20,00	
		Jumlah dokumen RKA dan perubahann RKA yang disusun	10	2	2	100	2	20,00	

Nomor Kode Urusan/Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaihan kinerja Renstra PD Tahun 2021 [akhir Periode Renstra PD]	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keharian Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg- iatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realisas i	Tingkat Realissi (%)			
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100 11
		Jumlah dokumen DPA dan Perubahan DPA yang disusun	10	2	2	100	2	2	20,00
		Jumlah dokumen ROPK yang disusun	10	2	2	100	1	1	10,00
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja yang disusun	10	2	2	100	2	2	20,00
6	1 5 2	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00 Telah memenuhi target
		Jumlah dokumen laporan TEPPRA yang dilaporkan	60	12	12	100	12	12	20,00

Nomor Kode Urusan dan Kegiatan	Urusan/Eldang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target capaihan Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Kelaaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg ianan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaihan target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaihan Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100
6	1 6	Jumlah dokumen laporan monevda l program dan kegiatan yang dilaporkan Nilai IKM meningkat	10	4	4	100	4	4	40,00
6	1 6 1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100,00	100	100	100,00	80	83	103,54
6	1 15	Cakupan penerbitan KTP, KK dan Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Pendidikan	100	100	100	100	100	91	91,00
6	1 15 1	Jumlah KIA yang diterbitkan	65.000	65.000	55.000	85	50.000	8,467	4,70

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keharuan Kegiatan PD tahun 2019			Target program/Keg- ianan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/ketepitan Renstra PD s/d tahun 2020	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Renja Tingkat Capaian Kinerja (%)		
							Realisasi Kinerja Renja Tingkat Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7-(6/5)*100	8	9	10-(9/4)*100
		Jumlah KK yang diterbitkan	300.000	64.300	100	50.000	18.177	6,06	
		Jumlah petugas Regester Desa yang terfisilitasi	8.640	1.152	100	1.728	21.067	243,83	
		Jumlah rapat koordinasi operator SIAK yang dilaksanakan	15	3	3	100	3	1	6,67
		Jumlah rapat petugas Regester Desa yang dilaksanakan	15	3	3	100	3	3	20,00
		Jumlah peserta rapat koordinasi yang dilaksanakan	3.075	615	100	3.045	270	8,78	
		Jumlah rapat koordinasi penertitian KIA	0	0	0	0	3	3	0,00
		Jumlah kepemilikan KIA meningkat	0	0	0	0	20		0,00
		Jumlah KTP el yang diterbitkan	0	0	0	50.000	34.429	0,00	

Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/tujuan berjalan PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	Jumlah sosialisasi Gisa yang dilaksanakan	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100
6	1	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan	100	100	100	100	100	100	0	0,00
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	20	4	4	100	4	100	2	0,00
		Jumlah peserta rapat koordinasi yang terfasilitasi	1.650	330	330	100	0	0	0	0,00
		Jumlah KTP yang diterbitkan bagi manula dan disabel	3.375	675	711	105	0	0	0	0,00
		Jumlah perekaman data KTP pemula	5.000	1.000	1.000	100	60	60	22	0,44
		Jumlah penduduk yang terlayani pindah datang	55.000	11.000	10.416	95	10.000	2.625	4,77	
		Jumlah penduduk ber-KTP meninggal	0	0	0	0	115	0	0,00	PIS Tidak dilaksanakan karena anggarannya dirasionalisasi

Nomor Kode Urusan dan Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 [akhir Renstra PD])	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keharian Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg latan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100 11
		Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekan data meningkat	0	0	0	0	115	0	0,00 PIS Tidak dilaksanakan karena anggarannya dirasionalisasi
		Jumlah perekaman data bagi manusia dan dilabel yang ditaksenakan	0	0	0	0	60	4	0,00
6 1 16	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Calapan penerbitan akta akta catatan sipil	100	100	99,55	100	100	82	126,50
6 1 16 1	1 Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Percentase penerbitan akta lahir 0-18 tahun	87	85	86	101	0	0	0,00
		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	60.000	10.000	8.817	88	9.800	3.958	6,60
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan	49000	7000	8830	126	7.000	3582	7,31
		Jumlah pelayanan akta kelahiran yang dilaksanakan	75	15	15	100	0	0	0,00 Tidak masuk data indikator kinerja dalam renja/DPATahun 2020

Nomor Kode Urusan/Program dan Kegiatan	Urusan/Eldang Urusan Pemerintahan Desentral Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 lakhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg istan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkirman realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		
				Target Realisas i	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Renja Kinerja (%)		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	
6 1 16 2	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Jumlah pernyuluhan akta-akta catatan sipil yang dilaksanakan	50	8	8	100	0	0	0,00	
		Jumlah permohonan akta kelahiran terlambat yang terfisilitasi	0	0	0	0	200	0	0,00	
		Jumlah pencairan perkawinan yang dilaksanakan	100	100	98	98	100	75	75,00	
		Jumlah pencairan perkawinan yang dilaksanakan	1.000	200	165	83	200	30	3,00	
		Jumlah petugas P4 yang terfasilitasi	105	21	21	100	0	0	0,00	
		Jumlah rapat koordinasi petugas P4 yang dilaksanakan	20	4	4	100	4	4	20,00	
		Jumlah kutipan akta perkawinan yang dicetak	1.000	1.000	100	0	0	0	0,00	
		Jumlah kutipan akta perceraian yang dicetak	200	200	100	30	10	10	5,00	

Nomor Kode Urusan dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/kieg latan Renja PD berjalan (Tahun 2020)	Perkirakan realisasi capaian target program/kiegatn Renstra PD s/d tahun 2020	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)			
						Catatan			
1	2	3	4	5	6	7=[6/5]*100	8	9	10-[9/4]*100
		Jumlah kartipan akta pengakuan anak yang yang diceetak	100	100	100	100	0	0	0,00
		Jumlah kartipan alcta pengesahan anak yang yang diceetak	100	100	100	100	0	0	0,00
		Jumlah desa yang didata pasangan perkawinan muslim yang belum tercatat secara adminduk	0	0	0	0	0	7	7 0,00
		Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan	0	0	0	0	15	6	0,00
6	1 17	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	90	100	100	100	100	18	20,00
6	1 17 1	Pengelolaan Data dan Informatasi Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	94	94,00	Telah memenuhi target

Nomor Kode Urusan dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg- ianan PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Renja Kinerja (%)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
								Catatan	
1	2	3	4	5	6	7-(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100 11
		Jumlah sosialisasi kebijakan admininduk yang dilaksanakan yang dilaksanakan	360	60	60	100	60	60	16,67
		Jumlah bahan publikasi yang dicetak	90	18	18	100	20	20	22,22
		Banner	100	20	20	100	4	4	4,00
		Kalender	3.000	1.000	1.000	100	1000	100	3,33
		Jumlah buku propil kependidikan yang disusun	900	180	180	100	180	180	20,00
		Jumlah dokumen yang diproses secara digital	275.000	55.000	55.000	100	45000	0	0,00
		Jumlah desa yang dievaluasi tertib admininduk	90	18	18	100	18	0	0,00
		Jumlah tenaga digitalisasi arsip yang dipekerjaikan		315	315	100	0	0	0,00
6	1 17 2	Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data		100	100	100	100	100	100,00

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan/Eidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg iatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan	
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Retja Kinerja (%)	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7-(6/5)*100	8	9	10-(9/4)*100	11
		Jumlah jaringan SIAK yang dipelihara	19	19	19	100	19	9	5	26,32
		Jumlah pengetahua di desa	0	0	0	0	36	36	0,00	
		Kompetensi ADB	0	0	0	0	2	2	0,00	
		Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3	3	3	100	0	0	0,00	
		Jumlah media yang dikelola (yang dapat diakses masyarakat)	1	1	1	100	1	1	50,00	
		Jumlah rapat koordinasi pengembangan SIAK	14	4	4	100	0	0	0,00	
6	1 18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi	Jumlah kerja sama yang telah dilaksanakan dikasih dengan OPD dan Desa	30	100	100	100	150	500,00	
6	1 18 1	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		80	100	100	100	100	125,00	Telah memenuhi target
		Jumlah pelayanan data yang dapat dilayani		30	30	100	30	41	136	

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan,/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg itan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkirman realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		
				Target Realisas i	Realisasi Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Renja Kinerja (%)		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		
								Catatan		
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100 11	
		Jumlah peserta rapat koordinasi yang mengikuti pemanfaatan data	275	75	75	100	100	100	36,36	
		Jumlah data agregat yang diceetak	1800	360	360	100	360	360	20,00	
		Jumlah peserta orang yang mengikuti sosialisasi perbup	0	55	55	100	55	55	0,00	
		Jumlah data anomali dan data ganda yang diverifikasi		0	0	0	14.000	14.000	0,00	
6	1 18 2	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		80	100	100	100	100	125,00	
		Jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan	100	17	17	100	17	17	17,00	
		Jumlah rapat launching kerjasama	5	1	1	100	0	0	0,00	
		Jumlah pembuatan KK yang diakses/akses	11	11	11	100	0	0	0,00	

Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 akhir Periode Renstra PD)	Target dan realisasi Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2019			Target program/keg iatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020	Catatan
				Target	Realisas i	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100
		Jumlah rapat koordinasi pembuatan perjanjian kerja summa		5	1	100	0	0	0,00
		Jumlah rapat koordinasi update data yang dilaksanakan	16	4	4	100	0	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan pelayanan dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan langsung kepada masyarakat yang berupa pelayanan akta-akta pencatatan sipil, pindah datang, pindah pergi penduduk, KK, KTP, KIA dan sebagainya. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik (pelayanan prima) kami telah disepakati menetapkan motto pelayanan yaitu " KAMI MELAYANI ANDA DENGAN IKHLAS "

Motto tersebut mengandung arti :

Semangat Batin : Dengan hati yang tulus dan niat yang baik mengerjakan tugas untuk memperoleh ridho-Nya.

Semangat Lahir : Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan :

I : Ikuti peraturan perundangan yang berlaku;

K : Kedepankan sikap ramah, santun, dan terpuji;

H : Hormati pemohon dengan sepenuh hati;

L : Lakukan pekerjaan semaksimal mungkin;

A : Akuntabilitas kinerja (dapat dipertanggungjawabkan);

S : Solutif, setiap ada masalah selalu ada penyelesaiannya/jalan keluar.

Sebagaimana diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi melaksanakan kebijakan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal 1 inovasi utama setiap tahun yang dikenal dengan Gerakan *One Agency, One Innovation*.

Oleh karena itu saat ini pelayanan prima kepada masyarakat menjadi suatu kewajiban OPD Pelayanan Publik. Semua OPD berlomba lomba dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, selain Gerakan *One Agency, One Innovation* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencanangkan suatu program yaitu Gerakan Indonesia Sadar Adminkuk (GISA). GISA merupakan suatu program dalam upaya tertib administrasi kependudukan, satu penduduk Indonesia mempunyai satu data administrasi kependudukan.

GISA : SADAR tentang "APA"

1. Sadar pentingnya dokumen kependudukan;
2. Sadar pentingnya data kependudukan yang benar;

3. Sadar pemanfaatan data kependudukan.

GISA : "SIAPA" yang harus "SADAR"

1. Sadar masyarakatnya,
2. Sadar petugasnya,
3. Sadar lembaga pengguna data

GISA: " TINGKATAN " gerakan SADAR :

1. Desa/Kelurahan Sadar adminduk;
2. Kecamatan Sadar adminduk;
3. Kabupaten Kota Sadar adminduk;
4. Provinsi Sadar adminduk;
5. Indonesia Sadar adminduk.

Berdasarkan program-program prioritas yang dilaksanakan, sebagai inovasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka dibuatlah istilah-istilah khas, unik, lucu serta kekinian yang bertujuan untuk menarik perhatian serta mempermudah untuk mengingat pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Tentunya karena unik maka tidak ada daerah lain yang menggunakan istilah tersebut. Ada 5 (lima) inovasi yang saat ini ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Cekidot (Cek Identitas Otomatis);
2. Si Dukun Semedi (Sistem Integrasi Dokumen Sehari Mesti Jadi);
3. Si Badu (Sistem Pelayanan Jemput Bola Sidang Isbath Terpadu);
4. Si Panjang (Sistem Pelayanan Jemput Bola sampai ke Ranjang);
5. Si Pelanduk (Sistem Penilaian Administrasi Kependudukan);
6. Paket Latika (Pelayanan Kalurahan Cepat Lahir, Mati, KK, KIA).

Inovasi pelayanan tersebut di atas telah dikuatkan dengan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 35/KPTS/2019, tanggal 24 September 2019 Demikian juga semakin dipermudahnya pelayanan yaitu dengan pelayanan terintegrasi misalnya : mengajukan permohonan akta kelahiran anak yang baru lahir akan mendapatkan NIK, KK baru dan akta kelahiran. Kemudahan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan. Foto kegiatan pelayanan kependudukan sebagai mana gambar di bawah ini :



Gambar 2.2.1.

Suasana rapat koordinasi dengan instansi terkait di ruang rapat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 2.2.2.
Pelayanan perekaman data KTP jemput bola bagi manula



Gambar 2.2.3.
Pelayanan perekaman data KTP jemput bola bagi pemula di SMA 1 Panggang



Gambar 2.2.4.
Pelayanan pencatatan perkawinan non muslim di dalam kantor



Gambar 2.2.5.
Penyerahan akta perkawinan non muslim di dalam kantor



Gambar 2.2.6.
Bersama PD penerima penghargaan dalam hal pelayanan publik lainnya
dari KEMENPANRB Tahun 2019

Dan jenis-Jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini dapat disampaikan seperti tabel 2.2.1 di bawah ini :

Tabel 2.2.

Jenis-Jenis Pelayanan Masyarakat

NO	BIDANG PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENYELESAIAN
1	2	3	4
1.	Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan KK - Pembuatan KTP - Pindah Pergi - Pindah Datang - Pembuatan KIA - Surat Keterangan 	Selesai
2.	Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Kelahiran - Akta Perkawinan - Akta Perceraian - Akta Kematian - Akta Pengangkatan anak - Akta Pengakuan dan Pengesahan anak - Salinan akta - Pencatatan pinggir - Perubahan nama 	
3.	Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan II akta- akta catatan sipil - Legalisasi - Pemanfaatan Data 	

Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Dinas itu sendiri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiap Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Kegiatan kesekretariatan, meliputi :

1. Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor yang meliputi;
2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran;
4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah;
5. Pengembangan kapasitas aparatur;
Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah;
6. Perencanaan kinerja perangkat daerah;
7. Pengendalian internal perangkat daerah;
8. Penyelenggaraan pelayanan publik.

II. Kegiatan teknis yang ada di bidang terdiri dari:

Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

1. Pelayanan pendaftaran dan identitas penduduk;
2. Pelayanan indah datang dan pendataan penduduk;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

3. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
4. Pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

5. Pengelolahan data dan informasi administrasi kependudukan;
6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data;

Program Pemanfaatan data dan Inovasi terdiri dari:

7. Kerjasama dan inovasi Pelayanan.

Sedangkan hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam arti tugas dan fungsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis	
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	INDIKATO KINERJA UTAMA											
1.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan											
	Cakupan Penerbitan KTP elektronik	100% (2021)	97%	98%	99%	100%	100%	94,71%	97,62%	98,38%	98,75%	Secara keseluruhan jumlah wajib KTP penduduk Kabupaten Gunungkidul berjumlah 593.714 orang dan yang telah diterbitkan KTPnya sebanyak 593.714 orang (98,38%) data ini diambil 30 September 2019
B.	IKK											
1.	Kepemilikan KTP Kepemilikan saksi kelahiran per 1.000 penduduk	100%	97%	98%	99%	100%	100%	94,71%	97,62%	98,38%	98,75%	Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada akhir Tahun 2019 sejumlah 768.523 orang dan yang telah diterbitkan akta kelahirannya sebanyak 3.39.323 orang (44,15%) kemudian × 1.000 data ini diambil 30 September 2019
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1. Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, maka hubungan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kementerian Dalam Negeri secara vertikal telah terjalin dan berjalan dengan baik khususnya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petunjuk pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah berperan sebagai pembina, fasilitasi, dan supervisi kebijakan yang telah dibuat, sedangkan Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan.

Hubungan koordinasi tersebut di atas terbukti pada mulai Tahun anggaran 2014 Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan Tugas Pembantuan lewat APBN, namun mulai Tahun 2017 kebijakan tersebut diubah dengan Dana Alokasi Khusus yang masuk dalam APBD dan untuk Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp2.590.230.000,00, namun setelah mewabahnya pandemi Covid 19 menjadi sebesar Rp2.456.815.000,00 yang mana aturan dan SHBJ mengikuti Daerah, namun petunjuk pelaksanaan mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pusat sehingga terkadang serapan dana DAK kurang optimal karena bulan Maret dana baru ditransfer ke daerah, namun permasalahan ini dapat teratasi bilamana ada silpa yang bersumber DAK sehingga kegiatan yang bersumber DAK pada tri wulan I tetap dapat dilaksanakan. Himbauan pelayanan daring dari Pusat utamanya dalam penyediaan alat Cetak Mandiri dapat terganggu realisasinya karena kegiatan yang telah dianggarkan Tahun 2021 dirasionalisasi oleh TAPD.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mendapatkan apresiasi dari Kemenpan/RB dengan penghargaan A- dalam pelayanan kepada masyarakat dan memperoleh penghargaan A dari Lembaga ORI terkait kepatuhan regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun demikian tetap ada saja komplain dari pemohon karena sifatnya subyektif kondisi saat pelayanan yang sedang ramai misalnya target waktu tentunya akan beda saat pelayanan dengan pemohon yang kurang ramai.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Secara umum masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak ada hambatan dan kendala, akan tetapi secara teknis ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapai diantaranya :

- Anomali data dan data ganda penduduk, hal ini terbukti masih adanya perbedaan jumlah data penduduk antara hasil pelayanan SIAK daerah dan data penduduk hasil konsolidasi dari Kementerian Dalam Negeri;
- Wajib KTP manula dan disabilitas yang belum rekam dengan tempat tinggal yang saling berjauhan ;
- Pengadaan blangko KTP-el terpusat di Kemendagri harus mengambil ke Pusat sendiri;
- Kesadaran mencari akta kelahiran masih rendah di kalangan penduduk yang berusia tua hal ini terbukti angka kepemilikan baru 44% yang didominasi anak usia 0-18 tahun dengan tingkat kepemilikan 90% lebih;
- Semakin berkurangnya SDM pelayanan sangat dirasakan ketika ada yang sakit dan cuti bersalin.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :

- Adanya anomali data dan data ganda;
- Penduduk wajib KTP belum semuanya memiliki KTP;
- Jumlah personil belum cukup karena pensiun dan mutasi;
- Tuntutan dari masyarakat akan pelayanan cepat dan mudah;
- Adanya himbauan pelayanan secara *on line* menuju *go digital* dari pusat (bila ada kurang valid datanya tak alnsung dapat dicroscek kepada pemohon);
- Tidak diperkenankannya belanja modal Tahun 2021.

b. Peluang :

- Diadakan pendataan, kemudian dilakukan pemutakhiran KK yang bersangkutan;
- Tetap dilaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya dokumen kependudukan baik tatap muka, media elektronik, media sosial dan Website;

- Penanda tanganan dokumen kependudukan secara elektronik (TTE) dan secara bertahap mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna terlaksananya pelayanan *online* secara penuh;
- Dengan sarana dan prasarana yang telah ada melaksanakan pelayanan daring.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah/ Kemendagri dan Kementerian PAN dan RB pembentuan dinas-dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didasarkan pada jumlah penduduk daerah bersangkutan, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul masuk dalam tipe A yang terdiri :

- a. Pejabat Tinggi Pratama 1 orang;
- b. Administrator 5 orang terdiri 1 orang Sekretaris Dinas;
- c. 4 Kepala Bidang dan Pengawas 11 orang Subag/Kasi, sampai saat ini ada jabatan Kasubag Keuangan tidak dilakukan pengisian sehingga kinerja Subag yang bersangkutan kurang optimal.

Terkait adanya kebijakan penundaan pengadaan barang modal pada Tahun 2021 bila benar-benar diberlakukan akan sangat berpengaruh pada Dinas kami yang langsung memberikan pelayanan langsung pada masyarakat terkait dengan keberlangsungan sarana dan prasarana yang harus ada seperti ADM yang dicanangkan pusat agar menjadi pertimbangan oleh TAPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis rancangan awal RKPD terhadap rancangan akhir RKPD program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada beberapa program/kegiatan yang tidak sesuai dana indikatifnya, sehingga harus disesuaikan karena adanya pemangkasan pagu anggaran yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan
 - 1.1. Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor pada RKPD awal sebesar Rp505.239.000,00 yang akan dipergunakan untuk kegiatan tatalaksana kegiatan surat-menjurut dinas, pembayaran jasa telepon, listrik dan air, penggandaan dan cetak, kebutuhan ATK, pembayaran THL beserta THRnya, pajak kendaraan dinas,

pemeliharaan peralatan kantor, komponen listrik, jasa kebersihan, surat kabar dan bahan kebersihan, namun pada anggaran Renja akhir dianggarkan sebesar Rp2.276.794.100,00, sehingga ada kenaikan sebesar Rp1.771.555.100,00 hal ini disebabkan belanja ATK di semua kegiatan disentralkan di kegiatan ini, demikian juga ATK berupa Ribbon ATK Printer KTP dan KIA yang memerlukan anggaran cukup besar (DAK non Fisik) ;

1.2. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Pada RKPD awal sebesar Rp157.761.500,00 yang akan dibelanjakan untuk pembiayaan rapat-rapat 750 Orang minum snek, 625 Orang makan dan minum dan perjalanan dinas 168 orang perjalanan dinas dalam daerah maupun 48 orang perjalanan luar daerah, namun dalam Renja akhir menjadi Rp157.761.500,00 bertambah sebesar Rp17.240.425,00 meskipun ada pengurangan anggaran makan rapat, tetapi anggaran Rapit test harus ditambahkan pada anggaran perjalanan daerah keluar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran, Pada awal RKPD sebesar Rp534.307.250,00 yang akan digunakan untuk membangun gudang arsip dinamis hasil pelayanan dokumen kependudukan, namun karena tidak diperkenankan dalam belanja modal, maka pada akhir RKPD menjadi Rp0,00;

2.2.Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran rancangan awal RKPD Rp230.343.100,00,- yang akan dibelanjakan untuk pemeliharaan 4 roda empat, 27 roda dua 54 AC, dan 1 gedung kantor dinas, 3 orang THL (2 orang penjaga malam dan 1 orang pengemudi) berkurang sebesar Rp40.653.100,00 karena 2 orang jasa parkir tidak diperkenankan dan anggaran BBM mendapat tambahan dari kegiatan sosialisasi Perda oleh DPRD sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp189.690.000,00 ;

3. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur

3.1.Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp7.100.000,00 guna memfasilitasi rapat koordinasi ASN dalam rangka pembinaan maupun terkait keadministrasian ASN dalam Tahun bersangkutan, namun pada RKPD akhir berkurang sebesar Rp1.575.000,00 karena berkurangnya anggaran makan dan minum rapat, sehingga menjadi sebesar Rp5.525.000,00;

- 3.2.Pengembangan Kapasitas Aparatur pada RKPD awal sebesar Rp40.850.000,00,- yang akan dibelanjakan untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan baik yang diselenggarakan pada lingkup DIY maupun yang diadakan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berkurang sebesar Rp16.850.000,00 karena adanya rasionalisasi yang berdampak berkurangnya target kinerja sehingga anggarannya menjadi sebesar Rp24.000.000,00;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah pada kegiatan ini hanya ada 1 kegiatan yaitu
- 4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp168.225.000,00 yang akan digunakan untuk belanja meterai untuk kelengkapan laporan SPJ keuangan, makan minum, snek dan minum rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan Tahunan besarnya anggaran ini karena saat Renstra disusun masih ada honorarium ASN yang mengelola keuangan, tetapi setelah dilakukan pencermatan sesuai kebutuhan berkurang sebesar Rp161.711.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp6.514.000,00;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, pada kegiatan
- 5.1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp29.300.000,00 yang akan digunakan untuk penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi guna penyusunan dokumen perencanaan dan belanja pendukung lain seperti ATK kegiatan dan belanja penggandaan materi rapat maupun penggandaan dokumen yang dikirim ke instansi terkait seperti Bappeda, Irda dan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Gunungkidul, namun setelah dilakukan pencermatan berkurang utamanya tidak dibolehkan anggaran makan dan minum rapat yang berkurang sebesar Rp13.800.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp15.500.000,00;
- 5.2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp7.550.000,00 yang akan dibelanjakan untuk belanja makan, snek dan minum rapat koordinasi pengendalian program dan kegiatan agar pelaksanaannya dapat terealisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dan belanja pendukung lain seperti ATK dan belanja penggandaan, namun setelah dilakukan rasionalisasi berkurang sebesar Rp5.025.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.525.000,00;

- 5.3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp0,00 yang akan dibelanjakan untuk belanja snek dan minum dan penggandaan kegiatan untuk menunjang rapat Forum Perangkat Daerah yang pada akhir RKPD dianggarkan sebesar Rp2.625.000,00;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 6.1. Pada Program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp21.250.750,00 kebutuhan belanja stop map berkop dan ATK pelayanan seperti toner, toner refil, penggandaan, snek dan minum rapat koordinasi penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai kontrol pelayanan yang diberikan kepada pemohon apakah sudah baik atau belum dan apabila ada kekurangannya dapat diperbaiki di masa yang akan datang pada RKPD bertambah sebesar Rp168.139.250,00 karena ada tambahan anggaran 4 orang THL yang pada saat Renstra disusun anggarannya berada di kegiatan 1.01 sehingga menjadi sebesar Rp189.390.000,00;
7. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan
 - 7.1. Pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas penduduk rancangan awal RKPD sebesar Rp1.919.390.000,00, untuk pengadaan blangko KK, KIA, cetak Formulir pelayanan ATK printer KTP-el berupa Fargo Ribbon, HDD Film dan Cleaning Kit dan ATK lainnya makan, snek dan minum rapat koordinasi implementasi SIAK baik internal dinas yang mana dilaksanakan dengan petugas yang melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan (operator SIAK), Petugas Register Desa, Aparatur pada Kecamatan dan Dinas terkait dan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah berkurang sebesar Rp1.546.440.100,00 karena cetak blangko KK sudah diganti dengan HVS 80 gr dan ATK Printer KTP dan KIA dipindahkan ke kegiatan 1.01 sehingga menjadi sebesar Rp372.950.000,00;
 - 7.2. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan rancangan awal RKPD sebesar Rp423.679.350,00 yang direncanakan untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi perpindahan penduduk baik yang masuk daerah maupun pergi ke luar Kabupaten Gunungkidul seperti untuk belanja cetak formulir pelayanan pindah penduduk dan dukungan ATK, penggandaan, makan, snek dan minum rapat koordinasi kepada instansi terkait dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pelayanan jemput bola kepada wajib KTP pemula,

manula dan penyandang disabilitas yang perlu difasilitasi setelah belanja ATK disentralkan pada kegiatan 1.01 dan rasionalisasi makan minum rapat berkurang sebesar Rp354.494.350,00 sehingga menjadi sebesar Rp69.185.000,00

8. Program Peningkatan pelayanan pencatatan sipil, pada kegiatan
 - 8.1. Pada kegiatan Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian pada rancangan awal dianggarkan sebesar Rp523.265.225,00 yang akan dibelanjakan untuk ATK, cetak kutipan akta beserta registernya, penggandaan, rapat koordinasi terkait capaian target akta kelahiran, kematian dengan instansi terkait, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan akta-akta pencatatan sipil secara jemput bola dan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, namun karena cetak kutipan dan register akan diganti HVS 80 gr dan belanja ATK bergeser ke kegiatan 1.01 sehingga belanja berkurang sebesar Rp396.220.225,00 sehingga menjadi Rp127.045.000,00 ;

8.2. Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

Pada kegiatan ini awalnya dianggarkan sebesar Rp352.526.725,00 yang akan dibelanjakan untuk pembayaran honorarium petugas pembantu pencatatan perkawinan yang diperuntukkan pencatatan perkawinan non muslim dan pemberian ATK kepadanya, belanja ATK kegiatan, penggandaan, makan minum , minum dan snek rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah rangka pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar kantor, dikarenakan adanya rasioanalisis sehingga makan dan minum rapat tidak diperkenankan dan berkurangnya honorarium P4 dari 12 bulan menjadi 8 bulan anggarannya berkurang sebesar Rp250.981.725,00 sehingga menjadi sebesar Rp101.545.000,00;

9. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi

- 9.1. Pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan rancangan awal RKPD sebesar Rp316.213.825,00 yang akan dibelanjakan untuk kegiatan publikasi kebijakan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui media elektronik, web site, media online, media cetak, kegiatan digitalisasi arsip dan belanja pendukung berupa penggandaan kegiatan, makan, snek dan minum rapat koordinasi dan perjalanan dinas baik dalam

daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas bertambah sebesar Rp15.206.175,00 sehingga menjadi sebesar Rp331.420.000,00;

- 9.2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Kumunikasi Data pada rancangan awal RKPD sebesar Rp247.832.675,00 yang digunakan untuk pemeliharaan jaringan SIAK guna terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan baik yang ada di dinas maupun di 18 kecamatan, makan minum rapat koordinasi dan perjalanan dinas untuk memonitoring jaringan internet agar pelayanan dapat dilaksanakan secara terus-menerus, pelatihan SIAK bagi 60 orang/desa dan penilaian tertib adminduk kepada 18 desa namun setelah dilakukan pencermatan dan rasionalisasi berkurang sebesar Rp166.697.675,00; sehingga menjadi sebesar Rp81.135.000,00;

10. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi

- 10.1.Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan rancangan awal RKPD sebesar Rp225.750.200,00 yang akan dibelanjakan untuk pelayanan pemanfatan data administrasi kependudukan seperti rapat koordinasi pemanfaatan data dan perjanjian kerja sama, cetak buku agregat sebagai laporan ke pusat, dan belanja dukungan kegiatan seperti ATK kegiatan, penggandaan dan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah setelah dilakukan seperti makan dan minum tidak diperkenankan dan perjalanan dinas luar daerah disentralkan di Sekretariat berkurang sebesar Rp153.645.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp72.105.000,00;

- 10.2.Pada kegiatan Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan rancangan awal RKPD sebesar Rp194.642.925,00 yang akan dibelanjakan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi utamanya untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berupa inovasi pelayanan dan kerja sama terkait pemanfatan data untuk keperluan pembangunan belanja diperuntukkan dukungan kegiatan berupa ATK kegiatan, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah, namun dikarenakan adanya tambahan belanja anggaran sosialisasi yang akan dilakukan oleh anggota DPRD sebanyak 60 lokasi dan pergeseran anggaran sosialisasi GISA sebanyak 6 lokasi yang merupakan pindahan dari kegiatan 15.01. maka anggarannya bertambah sebesar Rp593.923.075,00 sehingga menjadi sebesar Rp788.566.000,00.

Total anggaran dalam RKPD akhir sebesar Rp4.831.516.025,- (Empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam

belas ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan guna terlaksananya tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan.Matrik Renja Tahun 2021 dapat kami sajikan pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Gunungkidul
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
								7	8	
1	2	3	4	5	6	SEMUJA URUSAN	SEMUJA URUSAN			
	Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Eidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	PROGRAM					PROGRAM				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dukcapil	Persentase Penemuan Administrasi Perkantoran	100%	663.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dukcapil	Persentase Penemuan Administrasi Perkantoran	100%	2.451.796
	KEGIATAN		Jumlah surat yang terkirim	1025 surat	505.239	Penyediakan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor		Jumlah surat yang terkirim	1.025 surat	2.276.794
1.1.	Penyediaaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor		Jumlah rekening Listrik yang dibayar	12 bulan			Dukcapil	Jumlah rekening Listrik yang dibayar		Bertambah Rp 1.771.555 karena ATK dipusatkan di kegiatan ini.
			Jumlah rekening air yang dibayar	12 bulan			Dukcapil	Jumlah rekening air yang dibayar	12 bulan	
			Jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan			Dukcapil	Jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan	
			Jumlah Jasa Kebersihan dibayar	12 bulan			Dukcapil	Jumlah Jasa Kebersihan dibayar	12 bulan	
			Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis			Dukcapil	Jumlah Note book yang dipelihara	3 unit	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	
1	2	3	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli	4	31 macam	5	6	9	Dukcapil
			Jumlah barang cetakan tersedia						Jumlah ATK kegiatan Administrasi Umum
			Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	6 macam					Jumlah barang cetakan tersedia
			Jumlah Listrik yang dibeli	12 jenis					Jumlah macam peralatan kebersihan tersedia
			Jumlah peralatan kebersihan tersedia		14 jenis				Jumlah surat kabar yang tersedia
									Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terbayar pajaknya
									Jumlah Mesin Ketik yang dipelihara
									Jumlah ATK kegiatan Administrasi Keuangan
									Jumlah penggandaan tersedia
									Jumlah mesin potong kertas yang dibeli
			Jumlah barang cetakan yang dicetak dan di garanfilkan	13 macam					1 unit

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dukcapil	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terbayar pialiknya	5 unit			
						Dukcapil	Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 bulan			
						Dukcapil	Jumlah Komputer yang dipelihara	5 unit			
						Dukcapil	Jumlah ATK kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 jenis			
						Dukcapil	Jumlah buktis yang di cetak	200 buku			
						Dukcapil	Jumlah filling kabinet yang dibeli	1 unit			
						Dukcapil	Jumlah printer yang dipelihara	10 unit			
						Dukcapil	Jumlah ATK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Perunduk	23 jenis			
						Dukcapil	Jumlah AC yang dibeli	2 unit			
						Dukcapil	Jumlah UPS yang dipelihara	0 unit			

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dukcapil	Jumlah ATK Kegiatan Pelayanan Pencairan Sipil	18 Jenis			
						Dukcapil	Jumlah komputer PC yang dibeli	5 unit			
						Dukcapil	Jumlah LCD yang dipelihara	0 unit			
						Dukcapil	Jumlah ATK kegiatan Pengumpulan Data Kependidikan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependidikan	15 jenis			
						Dukcapil	Jumlah alat rekam KTP yang dibeli	6 set			
						Dukcapil	Jumlah mesin Faksimile dan PAEX yang dipelihara	1 unit			
						Dukcapil	Jumlah ATK kegiatan Penyelegarsaan urusian Administrasi Kependidikan	12 jenis			
						Dukcapil	Jumlah Scanner yang dibeli	3 unit			
						Dukcapil	Jumlah ATK kegiatan Penataan Organisasi	15 jenis			

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
										Target capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur				Sarana dan Prasarana Aparatur		Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur			
	KEGIATAN					KEGIATAN					
2.1.	Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran				534.307	Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Dukcapil	Jumlah kursi yang dibeli	0	Pengadaan belanja modal tidak dibolehkan dan rekeningnya telah pindah 1.01	
		Jumlah kursi yang dibeli	4 buah				Dukcapil	Jumlah filing kabinet yang dibeli	0		
		Jumlah filing kabinet yang dibeli	3 buah				Dukcapil	Jumlah filing kabinet yang dibeli	0		
		Jumlah UPS yang dibeli	6 buah				Dukcapil	Jumlah UPS yang dibeli	0		
		Jumlah komputer yang dibeli	6 buah				Dukcapil	Jumlah komputer yang dibeli	0		
		Jumlah printer yang dibeli	6 buah				Dukcapil	Jumlah printer yang dibeli	0		
		Jumlah laptop yang dibeli	2 buah				Dukcapil	Jumlah laptop yang dibeli	0		
		Jumlah alat rekam yang dibeli	6 set				Dukcapil	Jumlah alat rekam yang dibeli	0		
2.2	Peneliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	27 unit	230.343	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	27 unit	189.690	Berkurang Rp40.653 Karena ada rasionalisasi		
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	5 unit				Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	5 unit			
		Jumlah AC yang dipelihara	54 buah				Jumlah AC yang dipelihara	10 buah			
		Jumlah gedung yang dipelihara	1 LS				Jumlah gedung yang dipelihara	1 LS			
3.	Program Peningkatan	Dukcapil	Persentase PNS/ aparatur sipil	100%	47.950	Program Peningkatan	Dukcapil	Persentase PNS/ aparatur sipil	100%	29.525	PPD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
								Indikator kinerja	Ilokasi	Target capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketatalaksunan dan Kapasitas Aparatur		taat aturan			Ketatalaksunan dan Kapasitas Aparatur					
3.1.	Penyelenggaraan Ketatalaksunan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi	70 orang	7.100	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Dukcapil	Jumlah ASN yang terfasilitasi	70 orang	5.525	Berkurang Rp 1.575 karena adanya rasionalisasi
3.2.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Dukcapil	Jumlah ASN yang terfasilitasi	70 orang	40.850	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Dukcapil	Jumlah ASN yang terfasilitasi	40 orang	24.000	Berkurang Rp 16.850 karena adanya rasionalisasi
4.	PROGRAM	Dukcapil	Persentase laporan		168.225	PROGRAM	Dukcapil	Jumlah laporan	40 orang	24.000	Berkurang Rp 16.850 karena adanya rasionalisasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		keuangan yang disusun tepat waktu			Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Dukcapil	keuangan yang disusun tepat waktu			
	KEGIATAN					KEGIATAN	Dukcapil	Percentase laporan	100%	6.514	PIPDI
4.1.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan ketuangans bulanan/SPJ	12 dokumen	168.225	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan bulanan/SPJ	Jumlah Laporan keuangan bulanan/SPJ	Jumlah Laporan keuangan bulanan/SPJ	12 dokumen	6.514	Berkurang Rp 161.711 karena adanya rasionalisasi dan saat Renstra disusun masih ada honer ASN
		Jumlah Laporan ketuangans semesteraan	2 dokumen			Jumlah Laporan keuangan semesteraan	Jumlah Laporan keuangan semesteraan	Jumlah Laporan keuangan semesteraan	1 dokumen		
		Jumlah Laporan keuangan tahunan	1 dokumen			Jumlah Laporan keuangan tahunan	Jumlah Laporan keuangan tahunan	Jumlah Laporan keuangan tahunan	1 dokumen		
		Jumlah meterai yang dibel	605 orang			Jumlah meterai yang dibel	Jumlah meterai yang dibel	Jumlah meterai yang dibel	0 orang		
5.	Program Peningkatan Kualitas	Dukcapil	Persentase kesesuaian program dalam	100%	36.850	Program Peningkatan Kualitas	Dukcapil	Persentase kesesuaian program dalam	100%	20.650	PIPDI

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Perencanaan		Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD		Perencanaan							
5.1.	KEGIATAN	Jumlah dokumen	25.250	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan perubahannya yang disusun	1 dokument	Perubahan Renja yang disusun	Dokumen Perubahan Renja yang disusun	1 dokument	15.500	Berkurang Rp13.800 karena ada rasionalisasi	
	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Renstra dan perubahannya yang disusain				Dokumen Renja yang disusain	Dokumen Perubahan Renja yang disusun	Dokumen Dokumen RKA yang disusun	Dokumen RKA yang disusun			
		Dokumen Renja yang disusain	1 dokument			Dokumen Perubahan Renja yang disusun		Dokumen RKA yang disusun	Dokumen LKJIP yang disusain			
		Dokumen RKA yang disusun	1 dokument			Dokumen RKA yang disusun		Dokumen ROPK yang disusun	Dokumen LKJIP yang disusain			
								Dokumen Perjalanan kinerja yang disusun	1 dokument			
5.2.	Pengendalian Internal Perangkat daerah	Jumlah dokumen Laporan TEPPA yang dilaporkan program dan kegiatan yang dilaporkan	7.550	Pengendalian Internal Perangkat daerah	Jumlah dokumen Laporan TEPPA yang dilaporkan program dan kegiatan yang dilaporkan	12 laporan		Jumlah laporan	12 laporan	2.525	Berkurang Rp5.025 karena ada rasionalisasi	
5.3.			2 laporan						2 laporan			
									Penyelegaraan Forum PD	1 kali	Rancangan awal belum ada	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaiann	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaiann	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	Nilai IKM PD	80,5	21.250	Program Peningkattan Kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	Nilai IKM PD	80,5	189.390	PIPD, DAK NON FTSIK		
6.1.	Penyelenggaran Pelayanan Publik	Dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dplkmen	21.250	Penyelegaraan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SKM	2 dokumen	189.390	Bertambah sebesar Rp 168.139 awalnya 4 orang THL, disanggarkan di kegiatan 1.01 dan ada cetak stopmap yang dibayai dengan DAK				
7.	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Calcupan penerbitan KTP, KK dan Surat Keterangan Mutasi Penduduk	100%	2.343.069	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Calcupan penerbitan KTP, KK dan Surat Keterangan Mutasi Penduduk	100%	442.135	PIPD, DAK NON FTSIK		
7.1.	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk	Percentase jumlah KK yang diterbitkan	98 persen	1.919.390	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	60.000 KK	Jumlah KTP yang diterbitkan	372.950	Berkurang sebesar Rp 1.546.440 karena ATK Riboon dan HDD Film dipindah ke kegiatan 1.01			
		Percentase jumlah KTP yang diterbitkan	100 persen					Jumlah KTP yang diterbitkan	45.000	keping			
								Jumlah KIA yang diterbitkan	60.000	keping			

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7.2.	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan	Jumlah penduduk pindah datang	13.625 orang	5	423.679	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)
		Jumlah penduduk pindah peng	12.998 orang			Jumlah penduduk pindah datang			5.000 orang	5.000 orang	69.185
		Jumlah	1.000 orang			Jumlah	penduduk pindah peng				Berkurang Rp354.494 karena ATK dipindah 1.01. dan dirasionalisasi pada komponen belanja lainnya seperti makan dan minum rapat koordinasi
		perekaman data KTP bagi manula dan difabel yang dilaksanakan				Jumlah	penduduk pindah peng				
		Jumlah	500 orang			Jumlah	penduduk pindah peng				
		perbaikan data KTP bagi manula dan difabel yang dilaksanakan				Jumlah	penduduk pindah peng				
		Jumlah	500 orang			Jumlah	penduduk pindah peng				
		perbaikan data KTP bagi wajib KTP pemula yang dilaksanakan				Jumlah	penduduk pindah peng				
		Jumlah	1 kali			Jumlah	penduduk pindah peng				
		perbaikan data KTP bagi wajib KTP pemula yang dilaksanakan				Cakupan layanan akta-akta catatan sipil					
8.	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dikapil	Cakupan layanan akta-akta catatan sipil	45%	875.791	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan akta-akta catatan sipil		45%	228.590	PIP, DAK NON FISIK
8.1.	Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian				523.265	Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian				127.045	Berkurang sebesar Rp396.220 karena adanya rasionalisasi komponen belanja kegiatan
		Percentase penerbitan akta lahir anak 0-18 tahun	87 persen								

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Hasil Analisis Kebutuhan		
										1	2	3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Kebutuhan Dana (Rp.000)	11.	12.
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan.	45 persen				Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta			
			Persentase akta kematian yang diterbitkan.	70 persen				Jumlah akta kematian yang diterbitkan	9.000 akta			
8.2.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian				352.526.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian		Jumlah peserta sidang isbat terfasilitasi		101.545	Berkurang sebesar Rp250.981 karena adanya resionalisasi komponen belanja kegiatan	
			Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	200				Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan	180 akta			
								Jumlah	30 akta			
9.	Program Pengelolaan data dan Penyebarluasan Informasi	Dukcapil	Persentase desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sipil	12,5%	564.046	Program Pengelolaan data dan Penyebarluasan Informasi	Dukcapil	Percentase desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sipil		12,5%	412.555	PIP, DAK NON FISIK
9.1.	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	20 lokasi	316.213	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan					331.420	Bertambah sebesar Rp 15.205 untuk belanja bahan publikasi sebagaimana tersebut pada bertambahnya indikator output kegiatan
								Jumlah	45.000 Berkas			
			Jumlah desa yang dievaluasi tertib administrasi	18 desa				Jumlah desa yang dievaluasi tertib administrasi	0 desa		Pindah ke kegiatan	9.02
								Jumlah bahan publikasi yang	20 banner			

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting	
								7	8		
10.	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi	Dukcapil	Jumlah pelayanan data yang diberikan kepada Desa /Lembaga	30 OPD/Lembaga	420.393	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi	Dukcapil	Jumlah OPD yang memanfaikan data	30 Lembaga	860.671	PIPDI, DAK NON FISIK
10.1	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependidikan	Dukcapil	Jumlah pelayanan data yang dapat dilayani	5 perjanjian kerja sama	225.750	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependidikan	Dukcapil	Jumlah OPD yang memanfaikan data	6 OPD	72.105	Berkurang sebesar Rp 153.645 karena adanya rasionalisasi komponen belanja seperti meskan dan minum rapat
								Jumlah rakor go digital dan inovasi pelayanan terfasilitasi	3 kali		
								Jumlah layanan yang terselenggara	30 OPD		
								Jumlah peserta rapat koordinasi pemanfaatan data terfasilitasi	100 orang		
								Jumlah peserta rapat koordinasi pemanfaatan data terfasilitasi	160 orang		
								Jumlah data aggregat yang disusun	360 Buku		
10.2	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dukcapil	Jumlah pemanfaatan data administrasi	6 OPD	194.642	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dukcapil		788.566	Bertambah sebesar Rp 593.924 karena adanya anggaran belanja sosialisasi dari DPRD sebanyak 60 lokasi dan lokasi pindahan dari kegiatan 15.01	

No.	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indicatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah		perjanjian kerja sama yang dilaksanakan		18 Perjanjian	
						Jumlah		sosialisasi (GISA) yang dilaksanakan			
						Jumlah		yang dilaksanakan			
						Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan sosialisasi Perda dan Peraturan DPRD		96 orang			
						Jumlah warga yang menerima sosialisasi Perda dan Peraturan DPRD		2.400 orang			
					Jumlah	5.905.227				4.831.516	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan pada proses perencanaan Tahun 2021 ini diperoleh dari para pemangku kepentingan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dihadiri perwakilan dari desa yang ada di Kecamatan yang bersangkutan dan data usulan yang kami peroleh saat mengikuti Musrenbang Kecamatan di 18 Kecamatan, kemudian dilanjutkan pada Forum PD/Gabungan PD yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peserta perwakilan 18 Kecamatan dan PD serumpun yang bermitra dengan Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan pada tahap terakhir saat Musrenbang Kabupaten yang diikuti perwakilan 18 Kecamatan dan semua PD, LSM, DPRD, akademisi dan lain-lain, namun dikarenakan ada Pandemi Covid 19 usulan pagu PIS senilai Rp76.527.000,00 tidak dapat dilaksanakan (tidak dientry dalam Pra RKA eplnning). Selain hal tersebut di atas ada usulan dinas yang belum terakomodir dikarenakan adanya pagu anggaran yang harus dipatuhi dan bukan menjadi kewenangan dinas seperti pembangunan Gudang Arsip yang yang telah disampaikan ke pada Dinas PUPKR, sedangkan usulan prioritas hasil Forum PD sebagaimana kami sampaikan pada tabel 2.5. berikut :

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 seperti tersebut di bawah ini dan karena kegiatan proses musrenbang belum dilaksanakan tabel dimaksud akan diperbarui sesuai hasil usulan masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kec
1.	2	3	4	5	6	7	8	Gago RT 02/09, Kedunggoth, Ngipar, Guntungkidul	10	5.025.00	1/desa	5.025.00	1	14	15	16
1.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi teritib administrasi	Masyarakat	Bajai Desa Kepel, Jalan Ki Ageng Giring Kepel Wontosari Gunungkidul	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	2	5	Priority	Sudah Sesuai
2.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi teritib administrasi	Orang	Blemben, Candirejo, Semin	50/Desa	44.000.000	50/Desa	44.000.000	2	13	Priority	syarat usulan sudah terpenuhi
3.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat	Desa Gombang, Pospong, Guntungkidul	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	2	14	Priority	Pengurusan Kepemilikan KIA
4.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat									

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Susunan Daerah	Program	Kepastian Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kecamatan	
1.	2	3	4	5	6	7	Masyarakat	Sriman, Wonosari, Gunungkidul, D I Yogyakarta	10	11	12	13	14	15	16	
5.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Peningkata n Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian (Fasilitasi sidang Isbat)	Jumlah pasangan muslim yang memiliki buku nikah meningkat			3/persa ng	20.940.000	3/psa ng	20.940.000	3	12	Prioritas	syarat usulan sudah terpenuhi
6.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kean	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan Pereklaman data wajib KTP-el secara jemput bola bagi manula)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mampu nyai KTP-el meningkat;	Orang	watugajah, Gedangsari, gunungkidul	10/ora ng	8.100.000	10/oran g	8.100.000	3	61	Prioritas	Pentingnya e-KTP bagi manusia, namun dokumen tidak lengkap
7.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kean	Pelayanan Pendaftaran Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Kelompok Desa Karangasem	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	4	10	Belum Prioritas	Pelayanan KIA dapat dilaku kan secara kolektif oleh pihak sekolah	

N o	PIS o /PI WK	Priorita s Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan n	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecama tan	Pagu Kecama tan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Status Verifikasi si Kecam atan	Catata Verifikasi asi Kec atan	
1	2	3	4	5	6	7	Masyarakat	Desa Hargosari	9	10	11	12	13	14	16	17
8.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayan an KIA yang tersela nggara	Masyarakat	Desa Hargosari	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	4	14	Prioritas	Terfasi litasi ya pelaya nan KIA jempu t bola
9.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarlu asan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependudukan)	Jumlah terlaksana nya sosialis asi tertib adminis trasi	Masyarakat	Halai Desa Kepek Wonosari Gunungkidul	1/desa	5.025.0 00	1/desa	5.025.0 00	4	23	Prioritas	syarat usaha n sudah terpen uti
1	PIS o.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Peningkatas n Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian (Fasilitasi sidang Isbat)	Jumlah pasang an muslim yang memilk i buku nikah mening kat	Masyarakat	Desa Balong Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul	10/pasang	69.800. 000	10/pasa ng	69.800. 000	4	51	Prioritas	Fasilit asi pener bitan buku nikah
1.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayan an KIA yang tersela nggara	Masyarakat	Rejosari	50/Des a	44.000. 000	50/Des a	44.000. 000	5	17	Prioritas	Pening katan Pelaya nan KIA
1.	PIS 2.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayan an KIA yang tersela nggara	Masyarakat	Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	5	19	Prioritas	Terfasi litasi ya pelaya nan KIA jempu t bola

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daurah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ucur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIS 3.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Keperludukan Kran	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan wajib KTP-el secara jemput bola bagi masyarakat)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat;	Masyarakat	Bedoyo, Porjong, Gunungkidul	5/orang	4.050.000	5/orang	4.050.000	5	23	Prioritas	Pelayanan E-KTP Jempol boba
1	PIS 4.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Keperludukan Kran	Pelayanan Pendaftran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang tersedia	Orang	Babat Desa Ngurut	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	5	52	Prioritas	tercepat ainya pelayanan kependudukan untuk anak-anak diterima
1	PIS 5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data Adminitrasi Kependudukan (Pengelolaan data dan informasi Adminitrasi Kependudukan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi asi tertib adminiduk	Masyarakat	Desa Girijati	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	6	9	Prioritas	
1	PIS 6.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Keperludukan Kran	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan wajib KTP-el secara jemput bola bagi masyarakat)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan	Masyarakat	Wareng, wonosari, Gunungkidul	50/orang	40.500.000	50/orang	40.500.000	6	19	Prioritas	syarat usulan sudah terpenuhi

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolak Ucur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	(Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catata Verifikasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	PIS 7.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendaftaran Kependidikan (Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi disabilitas)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan ber KTP-el meningkat;	Masyarakat	Bedoyo, Purjong, Gunungkidul	2/orang	1.620.000	2/orang	1.620.000	6	34	Prioritas	Pelayanan E-KTP bagi disabilitas
1.	PIS 8.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nya sosialisasi tertib administrasi	Masyarakat	Desa Karangasem	1/desa	5.025.000	1/desa	5.025.000	7	11	Belum Prioritas	Kegiatan ATMIN DUK belum dapat prioritas, keterbatasan anggaran.
1.	PIS 9.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nya sosialisasi tertib administrasi	Masyarakat	Wareng, Wonosari, Caturungkidul	1/desa	5.025.000	1/desa	5.025.000	7	30	Prioritas	syarat usulan sudah terpenuhi

N	PIS o	Priorita s Daerah	Sesaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Status Verifikasi Kecamatan	Catata Verifikasi Kec Kec
1.	2	Reformasi Birokra si dan Pelayan an Publik	Akuntabi litas kinerja Pemerint ah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarlu asan Informati on	6	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib administ ratif	Masyarakat	Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul	1/desa	5.025.0 00	1/desa	5.025.0 00	14	15	Prioritas
2.	2.1.	Reformasi Birokra si dan Pelayan an Publik	Akuntabi litas kinerja Pemerint ah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependiduka kan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayan an KIA yang tersela ng	Masyarakat	Serut	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	7	46	Prioritas
2.	2.2.	Reformasi Birokra si dan Pelayan an Publik	Akuntabi litas kinerja Pemerint ah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarlu asan Informati on	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependiduka kan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependiduka kan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib administ ratif	Masyarakat	Desa Girinungku, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul	1/desa	5.025.0 00	1/desa	5.025.0 00	8	2	Prioritas
2.	2.3.	Reformasi Birokra si dan Pelayan an Publik	Akuntabi litas kinerja Pemerint ah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependiduka kan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib administ ratif	Masyarakat	Desa Girinjerto	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	8	6	Prioritas

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukar Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Unitan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catata Verifikasi asli Kec	
1	2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengembangan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pendafataran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat	Desa Bandung Kecamatan Playen	4/Desa	3.520.00	4/Desa	3.520.00	8	7	Belum Prioritas	pagu tidak terculik upi
2	4.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengembangan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependidikan (Pelayanan Perekaman data wajib KTP-el secara lengkap bagi manula)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat	Masyarakat	Serut	10/orang	8.100.00	10/orang	8.100.00	8	20	Prioritas	Penting untuk identitas kepemimpinan, namun foto belum ada
2	5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengembangan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependidikan (Pelayanan Perekaman data wajib KTP-el secara lengkap bagi manula)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat	Masyarakat	Serut	10/orang	8.100.00	10/orang	8.100.00	8	20	Prioritas	Penting untuk identitas kepemimpinan, namun foto belum ada
2	6.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlepasnya sosialisasi administrasi tertib administrasi	Masyarakat	Desa Balong Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	8	60	Prioritas	pengelolaan data kependidikan
2	7.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlepasnya sosialisasi administrasi tertib administrasi	Masyarakat	Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	9	18	Prioritas	Menjadi prioritas untuk dilaksanakan

No	PIS /PLW/K	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukar Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PIS 8.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administra si Kependudu kan Daerah meningkat	Pelayanan Pendaftran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat	Desa Girikarto	1/Desa	880.000	7/Desa	6.160.00	10	11	Prioritas	Pelayanan KIA secara jemput bola
2	PIS 9.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependudukan)	Jumlah teraksa nanya sosialisasi tertib adminis trasi	Masyarakat	Balai Desa Getas Kecamatan Pisayen Kabupaten Gunungkidul	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	10	30	Prioritas	meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tertib administrasi
3	PIS 0.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Peningkata n Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian (Facilitasi sidang Isbat)	Jumlah pasangan muslim yang memiliki buku nikah meningkat	Masyarakat	Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul	3/passang	20.940.000	3/passang	20.940.000	10	30	Prioritas	Menjadi prioritas untuk dilaksanakan
3	PIS 1.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administra si Kependudu kan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan Perekaman data wajib KTP-el secara jemput bola bagi manusia)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekm data dan	Masyarakat	Desa warusigoro	10/orang	8.100.00	10/orang	8.100.00	10	36	Prioritas	Masih banyak k lansia yang belum mempunyai E-KTP

N o	PIS /PI WK	Priorita s Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kepriortiasan	Tolok Ukar Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Status Verifikasi Kecamatan	Catata Verifikasi Kec			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	PIS 2.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependidikan (Pelayanan perekatman data pendukuk wajib KTP-el secara jemput bola bagi disabilitas)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan ber KTP-el meningkat;	Masyarakat	5/orang	4.050.00	5/orang	4.050.00	10	53	Prioritas	Penitigaya identitas KTP bagi warga difabel namun n. dokumen belum lengkap	
3	PIS 3.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Perangketan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Perkawinan dan Percerahan (Fasilitasi sertifikat Isbat)	Jumlah pasangan muslim yang memiliki buku nikah meningkat	Masyarakat	4/pasang	27.920.000	4/pasang	27.920.000	11	17	Prioritas	Fasilitasi sidang Isbat	
3	PIS 4.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Pendiduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat	5/Desa	4.400.00	5/Desa	4.400.00	11	28	Prioritas	Pelayanan KIA secara jemput bola	

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kecamatan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kecamatan	
1	2	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	4	5	6	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat;	Masyarakat	Desa Giriwungu, Panggang, Gunungkidul	10	11	12	13	14	15	16	Belum Prioritas
3	5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependidikan (Pelayanan Perekatman data wajib KTP-el secara jenput bola bagi manusia;	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat;	Masyarakat	2/orang	1.620.00	7/orang	5.670.00	12	3	15	17	Belum mendekat
3	6.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksanaanya sosialisasi tertib administrasi	Masyarakat	Balai Desa Karangasem	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	12	15	15	Belum Prioritas
3	7.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksanaanya sosialisasi tertib administrasi	Orang	Kebonjero RT.01/RW.06, Pengkol, Ngipar, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	12	17	17	Prioritas

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kepriatahan	Sasaran Kepriatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	PIS 8.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependudukan)	Jumlah terlaksanaanya sosialisasi tertib administrasi	Masyarakat	Desa Sidorejo, Porjong, Gunungkidul	1/desa 00	5.025.00	1/desa 00	5.025.00	12	52	Prioritas	Pengelolaan Data ATMEN DUK
3	PIS 9.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayaman KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat	Balai Desa Pacarejo	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	13	13	Prioritas	syarat belum lengkap P, akan segera dilengkapi dan diserujui di forum sebagai kategori prioritas
4	PIS 0.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendaftaran Kependudukan (Pelayaman Perekaman data wajib KTP-el secara jemput bola bagi manula)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah reclam data dan mempunyai KTP-el meningkat	Masyarakat	Girisikar	50/orang	40.500.000	50/orang	40.500.000	13	19	Prioritas	Pelayanan Perekaman data wajib KTP-el secara jempol holis bagi manula

No	PIS /PT WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukar Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kecamatan	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	PLS 1.	Reformasi dan Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependudukan)	Jumlah terlaksana nya sosialisasi wajib tertib adminstrasi uk	Masyarakat	kali tekuk	1/desa	5.025.0 00	1/desa	5.025.0 00	13	22	Prioritas	Sosialisasi Tertib Admin duk
4.	PLS 2.	Reformasi dan Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi disabilitas)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan ber KTP-el meningkat	Masyarakat	Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.	2/orang	1.620.0 00	2/orang	1.620.0 00	13	29	Prioritas	Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi disabilitas
4.	PLS 3.	Reformasi dan Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah terlaksana nya sosialisasi wajib tertib adminstrasi uk	Masyarakat	Tukluk, RT 005/004 Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul	1/desa	5.025.0 00	1/desa	5.025.0 00	14	2	Belum Prioritas	Admin duk belum dilaksanakan keterbatasan pagu anggaran
4.	PLS 4.	Reformasi dan Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam	Masyarakat	Desa Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul	10/orang	8.100.0 00	10/orang	8.100.0 00	14	70	Prioritas	Pelayanan E-KTP Elektronik marwaa

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolak Ucur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Unitan Prioritas Desa	Unitan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi asli Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	PIS 5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanhan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib administik	Masyarakat	balai desa wonosari	1/desa 00	5.025.0	1/desa 00	5.025.0	16	40	Prioritas syarat usulan sudah terpenuhi	
4	PIS 6.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanhan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib administik	Masyarakat	GIRITHIKO	1/desa 00	5.025.0	1/desa 00	5.025.0	16	45	Prioritas diterima	
4	PIS 7.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanhan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelola data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib administik	Masyarakat	Desa Sidorejo, Ponjeng, Gunungcadul	10/orang	8.100.0	10/orang	8.100.0	16	79	Pelayanan E KTP bagi Disabiliitas	

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catata Verifikasi Kecamatan	
1	2	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	4	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	6	Jumlah Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Masyarakat	sampang gedang sari gunungkidul	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	8.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	5	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jurnlah Pelayanan KIA yang terselenggara	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	17	43	Prioritas	Penitinan gaya pelayanan KIA untuk pengurangan stunting, namun doku men kurangi lengkap
4	9.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan		Jumlah Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Masyarakat	Kantor Kepala Desa Ngalang Kecamatan Gedungsari Kabupaten Gunungkidul	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	17	49	Prioritas	Penitinan gaya layanan KIA untuk identitas anak, doku men lengkap	
5	0.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Keluarga	Desa Sidorejo, Pojongan, Gunungkidul	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	20	28	Belum Prioritas	Pelayanan KIA dapat dilakukan dengan kolktif	

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Utk Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa.	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kec. Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.	PIS Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependidikan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat	DESA GIRIJATI	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	20	70	70	Prioritas diterima	
5.2.	PIS Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib admin dmk	Kelompok	Girimulyo	2/desa	10.050.000	2/desa	10.050.000	21	8	8	Prioritas Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan	
5.3.	PIS Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib admin dmk	Masyarakat	Balai Desa Giricahyo	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	21	31	31	Prioritas usulan diterima	
5.4.	PIS Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependidikan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidikan)	Jumlah terlaksana nanya sosialisasi tertib admin dmk	Orang	kantor desa nglegi patuk gunungkidul	1/desa	5.025.00	1/desa	5.025.00	24	50	50	Prioritas Mendekati untuk segera dilaksanakan guna pengelolaan	

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Susunan Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Susunan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catata Verifikasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																data admin duk lebih maksimal
5	PIS 5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administritasi Keependidukan	Pelayanan Pendukaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat Baitul Dea Girneayyo	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	24	51	Prioritas	Usulan Diterima	
5	PIS 6.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administritasi Keependidukan	Pelayanan Pendukaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang terselenggara	Masyarakat Desa Nglegi Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul	1/Desa	880.000	1/Desa	880.000	25	52	Prioritas	Sesuai dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul	
5	PIS 7.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administritasi Keependidukan	Pengelosan data dan informasi Administrasi Kependidukan (Pengelolaan data dan informasi Administrasi Kependidukan)	Jumlah terlaksanaanya sosialisasi terib administrasi	Masyarakat DESA GIRJAJATI	2/desa	10.050,- 000	2/desa	10.050,- 000	25	52	Prioritas	diterima	

No	PIS /PIWK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kehutanan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	Pondok, Sampaing, Gedangsari, Gunungkidul	10	11	12	13	14	15	16	17
5	PIS 8.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Alcountabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan wajib KTP-el secara jemput bola bagi manual)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat;	Masyarakat		20/orang	16.200.000	20/orang	16.200.000	25	57	Prioritas	Pentitngnya KTP bagi manual namun dokumen tidak lengkap
5	PIS 9.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Alcountabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk (Pelayanan KIA secara jemput bola)	Jumlah Pelayanan KIA yang tersedia	Masyarakat	baleidesa Karangduwet	6/Desa	5.280.00	6/Desa	5.280.00	26	38	Prioritas	diperlukan peningkatan kapasitas pelayanan KIA
6	PIS 0.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Alcountabilitas kerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan (Pelayanan wajib KTP-el secara jemput bola bagi manual)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan mempunyai KTP-el meningkat;	Masyarakat	desa negleg paruk gunungkidul	1/orang	810.000	1/orang	810.000	26	53	Prioritas	Meningkatkan pelayanan Perekaman E-KTP bagi Manual a

No	PIS /PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Kecamatan (Rp)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp)	Urutan Prioritas Kecamatan	Status Verifikasi Kecamatan	Catatan Verifikasi Kec	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	PIS	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang dan Pendaftaran Kependudukan (Pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP-el secara jemput bola bagi disabilitas)	Jumlah penduduk wajib KTP yang telah rekam data dan ber KTP-el meningkat	Masyarakat desa neglegi patuk gunungcidul	desa neglegi patuk gunungcidul	1/aran g	810.000	1/orang	810.000	27	56	Prioritas	Menin glantikan Pelayan KTP Elektro nik kepad a Perya ndang Disabi litas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi melaksanakan kebijakan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal 1 inovasi utama setiap tahun yang dikenal dengan Gerakan *One Agency, One Innovation*.

Oleh karena itu saat ini pelayanan prima kepada masyarakat menjadi suatu kewajiban OPD Pelayanan Publik. Semua OPD berlomba lomba dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, selain Gerakan *One Agency, One Innovation* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini juga baru mencanangkan suatu program yaitu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). GISA merupakan suatu program dalam upaya tertib administrasi kependudukan, satu penduduk indonesia mempunyai satu data administrasi kependudukan.

Disamping gerakan tersebut di atas kebijaksanaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk Tahun 2021 masih tetap fokus pada pencapaian akta kelahiran untuk kelompok umur 0 Tahun-18 Tahun sebagai pemenuhan hak anak. Kebijakan tersebut juga sebagai upaya sinkronisasi tematik pembangunan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kegiatan kerja sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kegiatan sidang isbat dengan harapan terpenuhinya syarat permohonan akta kelahiran bagi keluarga miskin yang telah menikah, namun belum diterbitkan buku nikahnya. Kemudian terkait dengan target 87% akta kelahiran 0-18 Tahun di Tahun 2021 atas kebijakan tersebut untuk mendukung program/kegiatan yang selaras dikucurkan Dana Alokasi Khusus guna tetap terlaksananya program penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) secara Nasional sebagai kebijakan Pemerintah tetap guna untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan di Daerah dengan nilai sebesar Rp2.590.230.000,00 di Tahun 2020 yang diperuntukkan fasilitasi kebutuhan blangko/formulir, sosialisasi, koordinasi, ATK printer KTP-el, Rakornas dan lain sebagainya, namun setelah ada wabah pandemi Covid 19 dirasionalisasi menjadi sebesar Rp2.456.815.000,00. Kemudian guna mendukung iklim pariwisata yang semakin berkembang di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang diikuti sarana prasarana akses pariwisata menuju lokasi

wisata utamanya ke arah pantai selatan yang semakin lancar dengan ditingkatkannya status jalan jalan kabupaten menjadi jalan propinsi yang semakin meningkat kualitasnya.

Dampak dari meningkatnya perkembangan kepariwisataan tersebut meningkatkan mobilitas penduduk di kabupaten Gunungkidul dan untuk mengantisipasi hal tersebut ditingkatkannya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan antara lain akses layanan terkait persyaratan permohonan, pengaduan, layanan terintegrasi, dan cek permohonan KTP apakah identitas pemohon sudah jadi atau belum melalui www.dukcapil.kab.gunungkidul.go.id. dan untuk selalu berusaha menciptakan identitas tunggal seseorang berupa KTP karena NIK berlaku Nasional sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari sasaran daerah telah ditetapkan yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dengan sasaran yang akan dicapai, denan mengacu pada tema pembangunan tahun 2021 adalah : “*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul*”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
2. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan;
4. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana;
5. Reformasi Birokrasi.

Maka terkait dengan prioritas pembangunan daerah tersebut di atas, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcomes)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcomes)
1	2	3	4	5	6
1.	Reformasi birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tertib Administrasi Kependudukan meningkat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan

Guna tercapainya target sasaran Perangkat Daerah tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana disajikan tabel 3.2. dan Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2021
1.	2.	3.	4.
1.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan	100%

Tabel 3.3.
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2021
1.	2.	3.	4.
1.	Tertib administrasi kependudukan meningkat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan	100%
2.	Kesesuaian Program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%
3.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)	100%
4.	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat	Nilai IKM PD	80,50

Dan untuk lebih memberikan perhatian dalam pencapaian target tujuan dan sasaran di atas, ditetapkannya indikator kinerja dinas yang dipandang telah merepresentasikan kinerja dinas berupa indikator kinerja utama dengan indikator yaitu Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (Percentase KTP yang telah diterbitkan) yang dapat kami sajikan pada tabel 3.5. di bawah ini :

Tabel 3.5.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	2.	3.	4.
1.	Tertib Administrasi Kependudukan meningkat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah, telah mendasarkan pada Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang mana telah memasuki tahap ke tiga dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai unsur pendukung dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerjanya harus mempertimbangkan potensi dan lingkungan internal maupun eksternal. RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021, dan guna mendukung Visi “ Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021” dengan misi sebagai berikut :

dan misi Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.;
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif;
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tema pembangunan pada Tahun 2021 adalah “*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul*”. Guna mendukung pencapaian misi pertama “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)” dengan sasaran daerah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu “*Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat*”, atas pertimbangan hal tersebut di atas dapat dipakai sebagai acuan dalam penjabaran program dan kegiatan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

b. Prioritas Pembangunan

Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2021 akan melaksanakan/memprioritaskan pembangunan yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya antara lain :

1. Penyelesaian perekaman data KTP-el reguler melalui petugas pelayanan di kecamatan-kecamatan setempat;
2. Perekaman data KTP-el wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas;
3. Perekaman data KIA dan penerbitan KIA;
4. Penyelesaian target akta kelahiran bagi anak 0-18 Tahun;
5. Memantabkan pelaksanaan aplikasi tanda tangan elektronik (*go digital*) dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan secara daring.

c. Pengurangan Kemiskinan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian yaitu dengan membebaskan denda administratif pengurusan akta kelahiran terlambat bagi keluarga kurang mampu/marginal dan kegiatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian melalui fasilitasi sidang isbat bagi 75 pasangan nikah yang belum tercatat perkawinannya secara Adminduk dan ini dimaksudkan untuk mengurangi warga yang telah menikah, namun belum diterbitkan buku nikahnya, sehingga dengan memiliki buku nikah ini dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Kegiatan Isbat nikah tersebut di atas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Tata Pemerintahan setda. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Kabupaten Gunungkidul Cq. Disdukcapil, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dijelaskan pada huruf b. dengan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman data KTP-el melalui petugas pelayanan di 18 kecamatan;
2. perekaman data KTP-el jemput bola bagi wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan bagi manula/sakit dan penyandang disabilitas;

Kemudian hasil perumusan program dan kegiatan untuk mendukung sasaran Perangkat Daerah dapat kami sajikan program dan kegiatan dalam tabel 4.1. sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 4.1.
Sasaran Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1.	2.	3.
1.	Tertib administrasi kependudukan meningkat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk; 2. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan. 2. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian; 2. Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian. 3. Program Pengelolaan data dan penyebarluasan informasi kependudukan, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan; 2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data. 4. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; 2. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
2.	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran; b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran 3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah; b. Pengembangan kapasitas aparatur 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
4.	Kesesuaian Program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kinerja perangkat daerah; b. Pengendalian Internal perangkat daerah; c. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :

1. Jumlah program pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah 10 program yang terdiri dari 18 kegiatan;

2. Sifat penyebaran program dan kegiatan, program dan kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin berlokasi di Dinas Dukcapil, sedangkan kegiatan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan dan Desa, sedangkan kegiatan yang sifatnya koordinasi sampai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat;
3. Jumlah kebutuhan dana yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp4.831.516.025,- (Empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah);
4. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten senilai sebesar Rp4.831.516.025,- (Empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah).

Dan dari 10 program yang terdiri 18 kegiatan tersebut untuk lebih mempertajam tujuan dan 5 sasaran daerah yang terdiri :

1. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
2. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan;
4. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana;
5. Reformasi Birokrasi.

Menurut tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan dukungan tercapainya sasaran yang ke 5 (lima) yaitu Reformasi Birokrasi yang ada program dan kegiatan dapat kami sajikan pada tabel 4.2. sebagai berikut :

Total anggaran dalam RKPD awal sebesar Rp4.831.516.025,- (Empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan guna terlaksananya tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan. Kemudian untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut ditetapkan program dan kegiatan yang terdiri dari 4 program prioritas dengan 8 kegiatan, yang didukung 6 program pendukung dengan 10 kegiatan. Program prioritas dimaksud dapat kami sajikan pada tabel 4.3. sebagaimana berikut :

Tabel 4.2.
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD				Indikator Sasaran PD				Program	Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
Reformasi Birokrasi	1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1.	Terlibat Kependudukan meningkat	1.	Terlibat Administrasi Kependudukan yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan	1.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan	100%	1.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	442.135.000	615.982.500	Dukcapil		
											Pelayatan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk	372.950.000	529.200.000			
											Pelayatan Pinjaman Denda dan Pendataan Kependudukan	69.185.000	86.782.500			
											2. Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	412.535.000	611.512.500	Dukcapil		
											Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan	331.420.000	517.237.500			
											Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	81.135.000	94.275.000			
											3. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	228.590.000	311.750.000	Dukcapil		

Tabel 4.3.
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2022)	SKPD
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.451.796.025	3.994.364.425	
1.1.	Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.276.794.100	3.802.742.000	Dukcapil
1.2.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	175.001.925	191.622.425	Dukcapil
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	189.690.000	223.339.575	
2.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	189.690.000	223.339.575	Dukcapil
3.	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	29.525.000	76.355.000	
3.1.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	5.525.000	5.525.000	Dukcapil
3.2.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	24.000.000	70.830.000	Dukcapil
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	6.514.000	6.514.000	
4.1.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6.514.000	6.514.000	Dukcapil
5.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	20.650.000	27.960.000	
5.1.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000	17.760.000	Dukcapil
5.2.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.525.000	5.200.000	Dukcapil
5.3	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	2.625.000	5.000.000	Dukcapil
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	189.390.000	214.886.000	
6.1.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	189.390.000	214.886.000	Dukcapil
Total		2.887.565.025	4.543.419.000	

Selain kebutuhan belanja anggaran belanja langsung untuk anggaran Tahun 2021, guna terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diperlukan kebutuhan belanja tidak langsung yang merupakan pembiayaan daerah guna membayar gaji Perangkat Daerah sebanyak 64 orang sehingga diperlukan anggaran sebesar Rp3.546.992.136 (Tiga milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPH/tunjangan khusus dan pembulatan gaji. Matrik Rencana Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah sebagaimana tabel 4.4. di bawah ini :

Tabel 4.4.
RENCANA PEMBIAYAAN APARATUR PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021

REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,00	Tahun	2.844.557.800	2.844.557.800
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	1,00	Tahun	273.772.268	273.772.268
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	162.750.000	162.750.000
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	Tahun	113.400.000	113.400.000
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	1,00	Tahun	149.474.880	149.474.880
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	2.995.748	2.995.748
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	41.440	41.440
Jumlah rencana pembiayaan					3.546.992.136

4.3. Dari hasil analisis rancangan awal RKPD terhadap RKPD program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada beberapa program/kegiatan Renstra tidak sesuai dana indikatifnya sehingga pada Renja akhir perlu penambahan atau pengurangan nilai anggarannya, karena disebabkan penganggaran dalam Renstra sebagai anggaran awal RKPD sifatnya hanya indikatif dan global sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dinas:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan
- 1.1. Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor pada RKPD awal sebesar Rp505.239.000,00 yang akan dipergunakan untuk kegiatan tatalaksana kegiatan surat-menjurut dinas, pembayaran jasa telepon, listrik dan air, penggandaan dan cetak, kebutuhan ATK, pembayaran THL beserta THRnya, pajak kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan kantor, komponen listrik, jasa kebersihan, surat kabar dan bahan kebersihan, namun pada anggaran Renja akhir dianggarkan sebesar Rp2.276.794.100,00, sehingga ada kenaikan sebesar Rp1.771.555.100,00 hal ini disebabkan belanja ATK di semua kegiatan disentralkan di kegiatan ini, demikian juga ATK berupa Ribbon ATK Printer KTP dan KIA yang memerlukan anggaran cukup besar (DAK non Fisik) ;
- 1.2. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Pada RKPD awal sebesar Rp157.761.500,00 yang akan dibelanjakan untuk pembiayaan rapat-rapat 750 Orang minum snek, 625 Orang makan dan minum dan perjalanan dinas 168 orang perjalanan dinas dalam daerah maupun 48 orang perjalanan luar daerah, namun dalam Renja akhir menjadi Rp157.761.500,00 bertambah sebesar Rp17.240.425,00 meskipun ada pengurangan anggaran makan rapat, tetapi anggaran Rapit test harus ditambahkan pada anggaran perjalanan daerah keluar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran, Pada awal RKPD sebesar Rp534.307.250,00 yang akan digunakan untuk membangun gudang arsip dinamis hasil pelayanan dokumen kependudukan, namun karena tidak diperkenankan dalam belanja modal, maka pada akhir RKPD menjadi Rp0,00;
 - 2.2. Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran rancangan awal RKPD Rp230.343.100,00,- yang akan dibelanjakan untuk pemeliharaan 4 roda empat, 27 roda dua 54 AC, dan 1 gedung kantor dinas, 3 orang THL (2 orang penjaga malam dan 1 orang pengemudi) berkurang sebesar Rp40.653.100,00 karena 2 orang jasa parkir tidak diperkenankan dan anggaran BBM mendapat tambahan dari kegiatan sosialisasi Perda oleh DPRD sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp189.690.000,00 ;
3. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
 - 3.1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp7.100.000,00 guna memfasilitasi rapat koordinasi ASN dalam rangka pembinaan maupun terkait keadministrasian ASN dalam Tahun bersangkutan, namun pada RKPD akhir berkurang sebesar Rp1.575.000,00 karena berkurangnya anggaran makan dan minum rapat, sehingga menjadi sebesar Rp5.525.000,00;
 - 3.2. Pengembangan Kapasitas Aparatur pada RKPD awal sebesar Rp40.850.000,00,- yang akan dibelanjakan untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan baik yang diselenggarakan pada lingkup DIY maupun yang diadakan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berkurang sebesar Rp16.850.000,00 karena adanya rasionalisasi yang berdampak berkurangnya target kinerja sehingga anggarannya menjadi sebesar Rp24.000.000,00;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Pada kegiatan ini hanya ada 1 kegiatan yaitu

- 4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp168.225.000,00 yang akan digunakan untuk belanja meterai untuk kelengkapan laporan SPJ keuangan, makan minum, snek dan minum rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan Tahunan besarnya anggaran ini karena saat Renstra disusun masih ada honorarium ASN yang mengelola keuangan, tetapi setelah dilakukan pencermatan sesuai kebutuhan berkurang sebesar Rp161.711.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp6.514.000,00;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, pada kegiatan
- 5.1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp29.300.000,00 yang akan digunakan untuk penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi guna penyusunan dokumen perencanaan dan belanja pendukung lain seperti ATK kegiatan dan belanja penggandaan materi rapat maupun penggandaan dokumen yang dikirim ke instansi terkait seperti Bappeda, Irda dan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Gunungkidul, namun setelah dilakukan pencermatan berkurang utamanya tidak dibolehkan anggaran makan dan minum rapat yang berkurang sebesar Rp13.800.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp15.500.000,00;
- 5.2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp7.550.000,00 yang akan dibelanjakan untuk belanja makan, snek dan minum rapat koordinasi pengendalian program dan kegiatan agar pelaksanaannya dapat terealisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dan belanja pendukung lain seperti ATK dan belanja penggandaan, namun setelah dilakukan rasionalisasi berkurang sebesar Rp5.025.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.525.000,00;
- 5.3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp0,00 yang akan dibelanjakan untuk belanja snek dan minum dan penggandaan kegiatan untuk menunjang rapat Forum Perangkat Daerah yang pada akhir RKPD dianggarkan sebesar Rp2.625.000,00;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 6.1. Pada Program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang pada rancangan awal RKPD dianggarkan sebesar Rp21.250.750,00 kebutuhan belanja stop map berkop dan ATK pelayanan seperti toner, toner refil, penggandaan, snek dan minum rapat koordinasi penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai kontrol pelayanan yang diberikan kepada pemohon apakah sudah baik atau belum dan apabila ada kekurangannya dapat diperbaiki di masa yang akan datang pada RKPD bertambah sebesar Rp168.139.250,00

karena ada tambahan anggaran 4 orang THL yang pada saat Renstra disusun anggarannya berada di kegiatan 1.01 sehingga menjadi sebesar Rp189.390.000,00;

7. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan
 - 7.1. Pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas penduduk rancangan awal RKPD sebesar Rp1.919.390.000,00, untuk pengadaan blangko KK, KIA, cetak Formulir pelayanan ATK printer KTP-el berupa Fargo Ribbon, HDD Film dan Cleaning Kit dan ATK lainnya makan, snek dan minum rapat koordinasi implementasi SIAK baik internal dinas yang mana dilaksanakan dengan petugas yang melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan (operator SIAK), Petugas Register Desa, Aparatur pada Kecamatan dan Dinas terkait dan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah berkurang sebesar Rp1.546.440.100,00 karena cetak blangko KK sudah diganti dengan HVS 80 gr dan ATK Printer KTP dan KIA dipindahkan ke kegiatan 1.01 sehingga menjadi sebesar Rp372.950.000,00;
 - 7.2. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan rancangan awal RKPD sebesar Rp423.679.350,00 yang direncanakan untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi perpindahan penduduk baik yang masuk daerah maupun pergi ke luar Kabupaten Gunungkidul seperti untuk belanja cetak formulir pelayanan pindah penduduk dan dukungan ATK, penggandaan, makan, snek dan minum rapat koordinasi kepada instansi terkait dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pelayanan jemput bola kepada wajib KTP pemula, manula dan penyandang disabilitas yang perlu difasilitasi setelah belanja ATK disentralkan pada kegiatan 1.01 dan rasionalisasi makan minum rapat berkurang sebesar Rp354.494.350,00 sehingga menjadi sebesar Rp69.185.000,00 ;
8. Program Peningkatan pelayanan pencatatan sipil, pada kegiatan
 - 8.1. Pada kegiatan Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian pada rancangan awal dianggarkan sebesar Rp523.265.225,00 yang akan dibelanjakan untuk ATK, cetak kutipan akta beserta registernya, penggandaan, rapat koordinasi terkait capaian target akta kelahiran, kematian dengan instansi terkait, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan akta-akta pencatatan sipil secara jemput bola dan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, namun karena cetak kutipan dan register akan diganti HVS 80 gr dan belanja ATK bergeser ke kegiatan 1.01 sehingga belanja berkurang sebesar Rp396.220.225,00 sehingga menjadi Rp127.045.000,00 ;

8.2. Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

Pada kegiatan ini awalnya dianggarkan sebesar Rp352.526.725,00 yang akan dibelanjakan untuk pembayaran honorarium petugas pembantu pencatatan perkawinan yang diperuntukkan pencatatan perkawinan non muslim dan pemberian ATK kepadanya, belanja ATK kegiatan, penggandaan, makan minum , minum dan snek rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah rangka pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar kantor, dikarenakan adanya rasioanalisis sehingga makan dan minum rapat tidak diperkenankan dan berkurangnya honorarium P4 dari 12 bulan menjadi 8 bulan anggarannya berkurang sebesar Rp250.981.725,00 sehingga menjadi sebesar Rp101.545.000,00;

9. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi

9.1.Pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan rancangan awal RKPD sebesar Rp316.213.825,00 yang akan dibelanjakan untuk kegiatan publikasi kebijakan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui media elektronik, web site, media online, media cetak, kegiatan digitalisasi arsip dan belanja pendukung berupa penggandaan kegiatan, makan, snek dan minum rapat koordinasi dan perjalanan dinas baik dalam daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas bertambah sebesar Rp15.206.175,00 sehingga menjadi sebesar Rp331.420.000,00;

9.2.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Kumunikasi Data pada rancangan awal RKPD sebesar Rp247.832.675,00 yang digunakan untuk pemeliharaan jaringan SIAK guna terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan baik yang ada di dinas maupun di 18 kecamatan, makan minum rapat koordinasi dan perjalanan dinas untuk memonitoring jaringan internet agar pelayanan dapat dilaksanakan secara terus-menerus, pelatihan SIAK bagi 60 orang/desa dan penilaian tertib adminduk kepada 18 desa namun setelah dilakukan pencermatan dan rasionalisasi berkurang sebesar Rp166.697.675,00; sehingga menjadi sebesar Rp81.135.000,00;

10. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi

10.1. Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan rancangan awal RKPD sebesar Rp225.750.200,00 yang akan dibelanjakan untuk pelayanan pemanfaatan data administrasi kependudukan seperti rapat koordinasi pemanfaatan data dan perjanjian kerja sama, cetak buku agregat sebagai laporan ke pusat, dan belanja dukungan kegiatan seperti ATK kegiatan, penggandaan dan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah setelah dilakukan seperti makan dan minum tidak diperkenankan dan perjalanan dinas luar daerah disentralkan di

Sekretariat berkurang sebesar Rp153.645.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp72.105.000,00;

10.2. Pada kegiatan Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan rancangan awal RKPD sebesar Rp194.642.925,00 yang akan dibelanjakan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi utamanya untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berupa inovasi pelayanan dan kerja sama terkait pemanfaatan data untuk keperluan pembangunan belanja diperuntukkan dukungan kegiatan berupa ATK kegiatan, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah, namun dikarenakan adanya tambahan belanja anggaran sosialisasi yang akan dilakukan oleh anggota DPRD sebanyak 60 lokasi dan pergeseran anggaran sosialisasi GISA sebanyak 6 lokasi yang merupakan pindahan dari kegiatan 15.01. maka anggarannya bertambah sebesar Rp593.923.075,00 sehingga menjadi sebesar Rp788.566.000,00.

Total anggaran dalam RKPD awal sebesar Rp4.831.516.025,- (Empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan guna terlaksananya tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut.

Tabel 4.5.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.2.06.01.01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	2.451.796.025					2.294.164.425
2.06.2.06.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			2.276.794.100	PIPD DAK NON FISIK				2.102.542.000
		Jumlah surat yang terkirim	Gunungkidul DIY, Luar Daerah	1023 surat				1025 surat	
		Jumlah rekening telepon yang dibayar	Dukcapil Gunungkidul	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah Jesa Kebersihan dibayar	Dukcapil Gunungkidul	12 bulan				2 Ternin	
		Jumlah Note book yang dipelihara	Dukcapil Gunungkidul	3 unit				10 unit	
		Jumlah ATK kegiatan Administrasi Umum	Dukcapil Gunungkidul	25 jenis				25 jenis	
		Jumlah burung cetaikan tersedia	Dukcapil Gunungkidul	6 macam				6 macam	
		Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	Dukcapil Gunungkidul	8 jenis				8 jenis	
		Jumlah macam peralatan keberatahan tersedia	Dukcapil Gunungkidul	14 jenis				14 jenis	
		Jumlah surat kabar yang tersedia	Dukcapil Gunungkidul	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah kendaraan dimas Roda 2 yang terbayar pajaknya	Dukcapil Gunungkidul	27 unit				27 unit	
		Jumlah rekening air yang dibayar	Dukcapil Gunungkidul	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah Mesin Ketik yang dipelihara	Dukcapil Gunungkidul	1 unit				1 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraaan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	Jumlah ATK Kegiatan Administrasi Keuangan	4	5	6	7	8	9	10
			Dukcapil Gunungkidul	23 jenis	20.000 lembar			23 jenis		
			Dukcapil Gunungkidul	5 unit			5 unit			
			Dukcapil Gunungkidul	12 bulan			12 bulan			
			Dukcapil Gunungkidul	5 unit			46 unit			
			Dukcapil Gunungkidul	15 jenis			15 jenis			
			Dukcapil Gunungkidul	200 buku			0 buku			
			Dukcapil Gunungkidul	10 unit			63 unit			
			Dukcapil Gunungkidul	23 jenis			23 jenis			
			Dukcapil Gunungkidul	0 unit			3 unit			
			Dukcapil Gunungkidul	18 jenis			18 jenis			
			Dukcapil Gunungkidul	0 unit			2 unit			
			Dukcapil Gunungkidul	15 jenis			15 jenis			
			Dukcapil Gunungkidul	1 unit			1 unit			
			Dukcapil Gunungkidul	12 jenis			12 jenis			
			Dukcapil Gunungkidul	15 jenis			15 jenis			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraaan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.01.02.	Jumlah ATK Sosialisasi Perda DPRD	Dukcapil Gunungkidul Wilayah	60 Paket				0 Ls	10
2.06.2.06.01.02.02.	Penyelidikan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Gumungkidul		175.001.925	PIPDAK NON FISIK			191.622.425
2.06.2.06.01.02.02.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Dukcapil Gunungkidul	700 OR				700 OR	
2.06.2.06.01.02.02.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Luar DIY	60 OH				64 OH	
2.06.2.06.01.02.02.02.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100 persen	189.690.000				223.339.575
2.06.2.06.01.02.02.02.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran			189.690.000	PIPDAK			223.339.575
2.06.2.06.01.03.	Jumlah gedung yang dipelihara	Dukcapil Gunungkidul	1 unit				1 unit	
2.06.2.06.01.03.02.	Jumlah kendaraan Roda 2 yang terpelihara	Dukcapil Gunungkidul	27 unit				27 unit	
2.06.2.06.01.03.02.01.	Jumlah AC yang terpelihara	Dukcapil Gunungkidul	20 unit				49 unit	
2.06.2.06.01.03.02.02.	Jumlah kendaraan Roda 4 yang terpelihara	Dukcapil Gunungkidul	5 unit				5 unit	
2.06.2.06.01.03.02.02.01.	Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas		100 persen	29.525.000				76.355.000
2.06.2.06.01.03.02.02.02.	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kepasitas Aparatur			5.525.000	PIPDAK			5.525.000
2.06.2.06.01.03.03.	Penyelegaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepengawadian Perangkat Daerah	Dukcapil Gunungkidul	75 ASN				75 ASN	
2.06.2.06.01.03.03.01.	Jumlah ASN yang bertanggani			24.000.000	PIPDAK			70.830.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Renovana Tahun 2021				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Perkiraaan Maju Rencana Tahun 2022
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
1	2	Jumlah apparatur yang mengikuti dikelar/karsus	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.2.06.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Dukcapil Gunungkidul, DIY, Luar Daerah	25 apparatur	25	5	7	8	75	6.514.000
2.06.2.06.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan/SRJ	Dukcapil Gunungkidul	12 dokumen	100 persen	6.514.000				6.514.000
2.06.2.06.01.05.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	6.514.000
2.06.2.06.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Semesteran	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	12 dokumen
		Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap RKPD, RPJMD	Dukcapil Gunungkidul	100 persen	20.650.000					27.960.000
					15.500.000					17.760.000
		Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2024	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen RKA	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Renja	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen RKA perubahan	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen DPA	Dukcapil Gunungkidul	1 Dokumen					1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraaan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Jumlah Dokumen DPA perubahan	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	
	Jumlah Dokumen ROPK	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja perubahan	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	
2.06.2.06.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah				2.625.000	PPID			5.200.000	
	Jumlah Dokumen L&JIP	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	
	Jumlah Laporan TEPR A	Dukcapil	12	laporan				12	laporan	
	Jumlah Dokumen Laporan Moniter Program dan Kegiatan	Dukcapil	4	laporan				4	laporan	
	Jumlah Laporan Serapan DAK Non Fisik Administrasi ke Pusat	Dukcapil	2	laporan				2	laporan	
2.06.2.06.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah				2.625.000	PPID			5.000.000	
	Penyelenggaraan Forum PD	Dukcapil	1	kegiatan				1	kegiatan	
2.06.2.06.01.06.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM PD	80,5		189.390.000	PIPL DAK NON FISIK			214.886.000	
2.06.2.06.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dukcapil	2	dokumen			2	dokumen	
	Jumlah dokumen SOP yang dievaluasi	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	
	Jumlah dokumen SIP yang dievaluasi	Dukcapil	1	dokumen				1	dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusen Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.2.06.01.15.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen RTP/SPIP yang disusun	Dukcapil Gunungkidul	1 dokumen	442.135.000		1 dokumen		615.982.500
2.06.2.06.01.15.01.	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk	Cakupan penerbitan KTP, KK dan Surat Keberangaman Mutasi Penduduk	56 persen		372.950.000	PIPD DAK NON FISIK			529.200.000
		Jumlah KK yang diterbitkan	Dukcapil Gunungkidul	60.000 KK				60.000 KK	
		Jumlah KTP yang diterbitkan	Dukcapil Gunungkidul	45.000 keping				45.000 keping	
		Jumlah KIA yang di terbitkan	Dukcapil Gunungkidul	60.000 keping				60.000 keping	
2.06.2.06.01.15.02.	Pelayanan Pindah Datang dan Pendaftaran Kependudukan	2			69.185.000	PIPD DAK NON FISIK			86.782.500
		Jumlah penduduk pindah datang	Dukcapil Gunungkidul	5.000 orang				13.625 orang	
		Jumlah penduduk pindah pergi	Dukcapil Gunungkidul	5.000 orang				5.000 orang	
		Jumlah perekaman data KTP bagi manula dan difabel	Dukcapil Gunungkidul, Wilayah Gunungkidul	500 orang				500 orang	
		Jumlah perekaman data KTP bagi pemula	Dukcapil Gunungkidul, Wilayah Gunungkidul	500 orang				500 orang	
		Jumlah pendaftaran penduduk reman	Dukcapil Gunungkidul	1 kali				1 kali	
2.06.2.06.01.16.	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta-akta catatan sipil	45 persen	228.590.000				311.750.000	
2.06.2.06.01.16.01.	Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	Dukcapil Gunungkidul	11.000 akta	127.045.000	PIPD.DAK NON FISIK		134.250.000	
								11.000 akta	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perdirektor Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Page Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Cepatian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	Jumlah akta kematian yang di terbitkan	3	4	5	6	9.000 akta	9	10
2.06.2.06.01.16.02.	Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	Dukcapil Gunungkidul			101.545.000	PIP,DAK NON FISIK		177.500.000
		Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	Dukcapil Gunungkidul	180 akta				180 akta	
		Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan	Dukcapil Gunungkidul	30 akta				30 akta	
		Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan	Dukcapil Gunungkidul	10 akta				10 akta	
2.06.2.06.01.17.	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Persentase desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sifil		12,05 persen	412.555.000				611.512.500
2.06.2.06.01.17.01.	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	Dukcapil Gunungkidul	45.000 berkas				331.420.000 PIP,DAK NON FISIK	517.237.500
		Jumlah bahan publikasi yang di cetak [banner]	Dukcapil Gunungkidul	20 banner					20 banner
		Jumlah bahan publikasi yang di cetak [kalender]	Dukcapil Gunungkidul	1.000 kalender					1.000 kalender
		Jumlah bahan publikasi yang di cetak [branding]	Dukcapil Gunungkidul	1 branding				0 branding	
		Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	Dukcapil Gunungkidul	4 paket				4 paket	
		Jumlah bahan publikasi secara visual (Video)	Dukcapil Gunungkidul	6 paket				6 paket	
		Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LM)	Dukcapil Germangkidul	2 paket				2 paket	
		Jumlah buku profil kependudukan yang cetak	Dukcapil Gunungkidul	180 buku				108 buku	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Perkiraaan Maju Rencana Tabun 2022		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.17.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	Dukcapil Kab. Gunungkidul	19 Lokasi	81.135.000	PIP,DAK NON FISIK		94.275.000
		Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	Dukcapil Kab. Gunungkidul	60 Orang				
		Jumlah Desa yang dievaluasi teritib administik	Dukcapil Kab. Gunungkidul	18 Desa				
2.06.2.06.01.18.	Permanfatan Data dan Inovasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan data	6 OPD	860.671.000				1.071.581.000
2.06.2.06.01.18.01.	Permanfatan Data dan Dokumen Kependidikan	Jumlah Rakor Go Digital dan Inovasi Pelayanan terfasilitasi	Dukcapil Gunungkidul	3 kali	72.105.000	PIP,DAK NON FISIK		94.160.000
		Jumlah layanan data yang terselenggara	Dukcapil Gunungkidul	30 OPD				
		Jumlah peserta rapat koordinasi Permanfatan Data terfasilitasi	Dukcapil Gunungkidul				30 OPD	
		Jumlah peserta rakor Data Amanali dan Data Ganda terfasilitasi	Dukcapil Gunungkidul	100 orang				150 orang
		Jumlah data agregat yang disusun	Dukcapil Gunungkidul	160 orang				160 orang
				360 buku				360 buku
2.06.2.06.01.18.02.	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan				788.566.000	PIP,DAK NON FISIK		977.421.000
		Jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan	Dukcapil Gunungkidul	18 perjanjian				18 perjanjian
		Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Dukcapil Gunungkidul Wilayah Gunungkidul	6 Lokasi				18 Lokasi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Perkiraaan Misi Rencana Tabun 2022			
			Locasi	Target Kinerja	Kebutuhan Duna/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Duna	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Duna/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan sosialisasi Perda dan Peraturan DPRD	Dukcapil Gunungkidul , Wilayah Gunungkidul	96 Orang	6				0 Orang	
	Jumlah warga yang menerima sosialisasi Perda dan Peraturan DPRD	Dukcapil Gunungkidul , Wilayah Gunungkidul	2.400 Orang					0 Orang	
	Total	Gumungkidul	4.831.516.025					5.454.045.000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM 2016-2021 dan RKPD 2021. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2021 adalah : *"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul"*. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
2. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan;
4. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana;
5. Reformasi Birokrasi.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum PD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka

diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Agustus 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

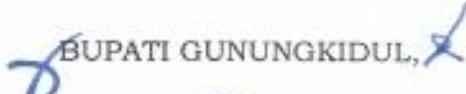
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 72

diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

BUPATI GUNUNGKIDUL,



BADINGAH
